

volume

1



Masyarakat Pribumi dan Hak Atas Kebenaran

Panduan untuk Praktisi



Masyarakat Pribumi dan Hak Atas Kebenaran: Volume 1

Panduan ini merupakan bagian dari seri AJAR tentang keadilan transisi di Australia dan Pasifik.

Edisi:

pertama, Maret 2022.

Tim Peneliti, Penulis dan Terjemahkan (Bahasa Inggris dan Indonesia):

Matheus Adadikam, Ani Sipa, Agusta Melani Sorabut, Solfinus Hendrik Horota, Nipson Murib, Derek Windessy, Agnes Deda, Matt Easton, Nick Dobrijevic dan Galuh Wandita.

Ilustrasi Sampul Depan:

Michael Yan Devis

Desain:

Wibi Arya

Foto dan Karya Seni:

Semua foto dan karya seni telah direproduksi dengan izin dari artis, fotografer, galeri, manajemen, atau pemilik hak cipta terkait. Foto dan karya seni tersebut tidak boleh direproduksi di luar publikasi ini tanpa lisensi atau izin sebelumnya.

Diterbitkan oleh Asia Justice and Rights (AJAR) dan Elsham Papua.

Penelitian ini dilaksanakan dengan dukungan Pemerintah Swiss Government.

Pandangan yang diungkapkan disini tidak mewakili pandangan mereka.

Masyarakat Pribumi dan Hak Atas Kebenaran: Volume 1 © Asia Justice and Rights 2022.

Konten dalam dokumen ini memiliki lisensi di bawah Creative Commons (atribusi, non-komersial, tanpa turunan 4.0 internasional)

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.asia-ajar.org. Materi yang tidak terkait dengan pemilik hak cipta selain Asia Justice and Rights tidak tunduk pada lisensi Creative Commons.

Cetakan Pertama, Maret 2022.

Siapa Kami?

ELSHAM Papua

ELSHAM Papua (Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia) lahir karena terjadi banyaknya pelanggaran HAM yang berlangsung terus menerus di Papua. ELSHAM, lahir pada 5 Mei 1998, merupakan cikal bakal dari IJWGP (Irian Jaya Working Group for West Papua) yang telah bekerja sejak tahun 1990an. Secara formal didirikan oleh tiga pimpinan gereja (GKI di Tanah Papua, Keuskupan Jayapura dan Kingmi Papua) dan aktivis NGO di Papua. Sejak didirikan, ELSHAM telah melakukan berbagai kegiatan monitoring, investigasi dan advokasi berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. ELSHAM Papua bekerja atas prinsip-prinsip HAM dengan visi mewujudkan tatanan masyarakat Papua yang memiliki kesadaran kritis terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi di Tanah Papua.

AJAR

Asia Justice and Rights (AJAR) adalah lembaga nirlaba yang bertujuan untuk memperkuat HAM dan bekerja untuk mengakhiri impunitas di kawasan Asia-Pasifik. AJAR memfasilitasi pembelajaran dan dialog tentang HAM, dokumentasi, resolusi konflik, dan proses-proses holistik untuk mendorong pemulihan, pemberdayaan, dan advokasi bagi para korban, keluarga, dan komunitas mereka. Kami percaya bahwa cara paling efektif untuk mencapai tujuan kami adalah dengan berinvestasi pada orang-orang yang akan terlibat dalam perjuangan menegakkan HAM dalam jangka panjang yang mencakup korban, penyintas dan aktivis HAM. Kerja kami saat ini berfokus pada negara-negara yang sedang mengalami transisi dari konteks pelanggaran HAM berat menuju demokrasi.

DAFTAR ISI

02

Prakata

06

Pendahuluan

Latar belakang dan tujuan
dari panduan ini

10

Bab 1

Masyarakat pribumi di
seluruh dunia

14

Bab 2

Masyarakat pribumi
dan hak asasi manusia

22

Bab 3

Keadilan transisional,
hak atas kebenaran, dan
mekanisme pengungkapan
kebenaran

32

Bab 4

Perjuangan yang lebih luas
untuk hak-hak masyarakat
pribumi: apa peran
pengungkapan kebenaran?

42

Bab 5

Memahami
pengalaman khusus
perempuan

50

Bab 6

Metode untuk partisipasi
yang berarti dalam proses
pengungkapan kebenaran

58

Bab 7

Pentingnya kemitraan
dengan masyarakat
sipil dan media massa

62

Bab 8

Keterlibatan dan
pendidikan publik

66

Bab 9

Melampaui proses
pengungkapan kebenaran:
merencanakan tindakan
berkelanjutan

68

Referensi

berdasarkan Bab

Prakata

Selama bertahun-tahun, masyarakat pribumi atau masyarakat adat Papua telah berjuang bersama melawan ketidakadilan. Dibalik penyalahgunaan kekuasaan yang merusak keadilan, hukum, dan hak atas kebenaran ada hak-hak masyarakat pribumi atas tanah mereka yang terus terkikis. Ketika masyarakat pribumi kehilangan tanah mereka, apa yang terjadi pada mereka? Kemana mereka harus pergi?

Saya teringat kalimat yang disampaikan seorang perempuan pribumi di Unurum Guay yang bekerja bersama kami, saat itu dia sedang menceritakan kehilangan yang dia rasakan setelah tanah mereka berubah menjadi perkebunan kelapa sawit:

“...Setelah pohonnya ditebang, setelah kita berdiri di dalam, terasa seperti hati ini hancur. Terasa seperti badan ini, kepala ini digunduli botak, hancur semuanya. Hutan sudah tidak ada, semuanya hilang”¹

Dijanjikan melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (2001), tindakan-tindakan khusus untuk pengakuan identitas lewat simbol-simbol kultural dan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi terus ditolak beberapa tahun kemudian. Menghadapi intimidasi, kekerasan dan perampasan lahan, masyarakat pribumi Papua terus melanjutkan perjuangan mereka untuk Hak Asasi Manusia (HAM).

Merupakan suatu kebahagiaan ketika Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua bersama dengan Asia Justice and Rights (AJAR) mempublikasi buku yang berjudul “Masyarakat Pribumi dan Hak atas Kebenaran”, buku yang berangkat dari pengalaman panjang kerja-kerja bersama dalam bidang HAM dan solidaritas masyarakat pribumi untuk mendorong pemenuhan HAM di Indonesia, Asia dan tentu

-
1. AJAR & PWC, Burung Pun Tak Ada Lagi: Perempuan Adat Bertahan Menghadapi Kehilangan Hutan di Papua. AJAR, 2021. Pg. 67.

untuk dunia. Kerja-kerja bersama ELSHAM Papua dan AJAR dapat memberi dampak dalam upaya-upaya pemajuan HAM, terutama dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya dan hak politik di berbagai komunitas.

Buku dengan judul “Masyarakat Pribumi dan Hak atas Kebenaran” ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi para aktivis dan memperkaya pembaca dalam gerakan mendorong serta membangun kesadaran bersama akan pentingnya hak masyarakat pribumi, khususnya hak atas kebenaran. Harapannya, buku ini juga dapat memperkuat masyarakat pribumi untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak asasi mereka dalam menghadapi berbagai tantangan serta pengaruh perubahan dunia yang terus terjadi.

Studi kasus tentang masyarakat pribumi Papua dan beberapa pengalaman yang diangkat dari masyarakat pribumi di wilayah Pasifik/Melanesia maupun Amerika Latin tentu akan memperkaya para pembaca.

Terima kasih kepada AJAR dan semua yang telah turut terlibat dalam menghasilkan sebuah buku yang sangat berharga untuk perjuangan eksistensi masyarakat pribumi di Papua dan dimana saja.

Jayapura, Januari 2022.

ELSHAM Papua.

Pdt. Matheus Adadikam.STh.





Dua aktivis masyarakat pribumi Sami berdiri dekat mural di depan Gedung Pengadilan Tinggi di Norrland Utara, Umeå, Swedia. Sebuah kasus, dikenal sebagai kasus Girjasmålet, mengembalikan hak untuk pengelolaan ikan dan binatang buruan dari pemerintah Swedia kepada masyarakat pribumi Sami di tanah Norrbotten.

Dalam lukisan mural, pemerintah Swedia digambarkan sebagai serigala berbaju jas yang tidak mengindahkan hak-hak masyarakat pribumi, dan maraup habis sumber daya alam. Rusa kutub (reindeer) merepresentasi masyarakat pribumi Sami yang berjuang melawan kekuatan negara sampai akhir hayat. Tertulis diantara keduanya, "Kami masih disini." (Karya seni oleh Anders Sunna dan foto Emma-Sofia Olsson, 2020).

Pendahuluan

Latar Belakang dan Tujuan dari Panduan Ini

Panduan ini, yang dibagi menjadi dua volume, menawarkan bantuan praktis kepada organisasi dan aktivis hak asasi manusia masyarakat pribumi dan non-pribumi, serta Pemerintah yang mempertimbangkan proses pengungkapan kebenaran terkait dengan masyarakat adat. Panduan ini menyaring pelajaran dari empat puluh tahun komisi kebenaran, terutama yang telah melibatkan masyarakat pribumi. Dokumen tersebut juga menguraikan kerangka kerja internasional yang muncul tentang hak-hak masyarakat pribumi, yang mungkin tidak dikenal oleh organisasi non-pribumi.

Volume 1

Selama 40 tahun terakhir, praktek keadilan transisional telah muncul di seluruh dunia, termasuk Komisi Kebenaran, sebagian besar dalam konteks pasca-konflik atau pasca-pemerintahan yang otoriter. Selama periode yang sama ini, gerakan masyarakat pribumi global telah mengarah pada pengembangan kerangka hak asasi manusia internasional tentang hak-hak masyarakat pribumi yang didukung oleh hampir semua negara. Sejauh ini, telah terjadi pembuahan silang yang terbatas antara kedua gerakan tersebut, meskipun studi kasus mendokumentasikan gelombang proses pengungkapan kebenaran yang muncul dipimpin oleh para aktivis masyarakat pribumi. Panduan ini bertujuan untuk membantu mendorong pembelajaran silang untuk tindakan lebih lanjut.

Panduan ini menjelaskan pilar utama keadilan transisional, hak atas kebenaran, dan menguraikan mekanisme yang mengejar hak atas kebenaran dalam kaitannya dengan ketidakadilan di masa lalu. Ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat adat yang memutuskan untuk mengejar proses pengungkapan kebenaran, seperti bagaimana hal itu dapat berkontribusi pada strategi politik dan hak mereka yang lebih luas.

Panduan ini berfokus pada pelajaran praktis tentang bagaimana melakukan proses pengungkapan kebenaran yang sukses melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan fokus pada perempuan. Ini mempertimbangkan metode untuk meningkatkan partisipasi, nilai kemitraan masyarakat sipil, dan bagaimana proses pengungkapan kebenaran dapat memberikan pendidikan publik untuk memobilisasi perubahan

sosial. Ada juga bagian tentang perencanaan untuk tindakan berkelanjutan di luar proses pengungkapan kebenaran.

Volume Kedua dari perangkat ini terdiri dari studi kasus dan menyediakan survei lebih luas tentang proses pengungkapan kebenaran yang melibatkan masyarakat pribumi. Studi kasus diatur berdasarkan wilayah, dan termasuk Komisi Kebenaran pasca-konflik yang melibatkan masyarakat pribumi di antara kelompok korban lainnya; komisi kebenaran berfokus pada pelanggaran tertentu terhadap masyarakat pribumi; penyelidikan khusus terhadap jenis pelanggaran tertentu atas masyarakat pribumi; penyelidikan khusus tentang hubungan historis antara masyarakat pribumi dan non-pribumi di suatu negara; penyelidikan institusional hak asasi manusia nasional ke dalam jenis pelanggaran tertentu terhadap masyarakat pribumi; proses pengungkapan kebenaran masyarakat sipil; dan proses pengungkapan kebenaran komunitas. Setiap studi kasus menyoroti elemen latar belakang, mandat, metodologi, operasional, laporan akhir, rekomendasi, dan tindak lanjut proses, serta beberapa pelajaran utama yang dipetik.

AJAR bukanlah organisasi masyarakat pribumi, tetapi LSM regional yang bekerja di seluruh wilayah untuk mendukung mekanisme pengungkapan kebenaran dan korban pelanggaran hak asasi manusia dalam kerangka keadilan transisional. Dalam bekerja dengan masyarakat pribumi, kami dengan rendah hati mengakui bahwa masyarakat pribumi sendiri memimpin perjuangan mereka untuk pengakuan dan realisasi hak-hak mereka. Dalam solidaritas, kita harus banyak belajar. Pada saat yang sama, kami percaya bahwa organisasi hak asasi manusia dan Pemerintah non-pribumi dapat berbuat lebih banyak untuk bekerja bersama organisasi dan komunitas masyarakat pribumi dalam kerangka kerja berbasis hak-hak dasar guna mengatasi ketidakadilan di masa lalu dan saat ini.

Asia adalah rumah bagi populasi masyarakat pribumi terbesar di dunia, banyak yang masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat yang berbeda. Banyak yang sangat rentan dalam menghadapi konflik dan pembangunan yang tidak terkendali di tanah dan wilayah leluhur mereka, termasuk perampasan, pencurian sumber daya alam, dan kekerasan yang ditargetkan.

Sebagai organisasi hak asasi manusia dan keadilan transisional, kita perlu membangun hubungan dengan para pembela hak asasi manusia dan aktivis penduduk pribumi di seluruh wilayah Asia-Pasifik. Hubungan seperti itu diperlukan di seluruh komunitas hak asasi manusia untuk bekerja dengan masyarakat pribumi agar mengatasi ketidakadilan masa lalu dan tantangan saat ini sehingga masyarakat dapat membangun landasan baru demi hubungan yang adil berdasarkan realisasi penuh atas hak asasi manusia.





Robert Campbell Jnr,
Kedutaan Orang Aborigin,
1986, cat polimer sintetis
di atas kanvas, 88 h x 107.3
w cm. Dengan izin Rolsyn
Oxley9 Gallery, Sydney.

01 Masyarakat Pribumi di Seluruh Dunia

Lebih dari 476 juta penduduk asli di 90 negara merupakan 6,2% dari populasi global. Lebih dari 5.000 komunitas masyarakat pribumi yang beragam dan berbeda serta berbicara dalam 4.000 bahasa.

Masyarakat pribumi tinggal di setiap wilayah di seluruh dunia, dengan sekitar 70% di Asia dan Pasifik; 16,2% di Afrika; 11,5% di Amerika Latin dan Karibia; 1,6% di Amerika Utara; dan 0,1% di Eropa dan Asia Tengah. Hampir tiga perempat masyarakat pribumi tinggal di daerah pedesaan. Hampir setengahnya tinggal di negara-negara berpenghasilan menengah, dengan 16% di negara-negara berpenghasilan rendah.

Siapa itu masyarakat pribumi?

Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan unsur-unsur definisi masyarakat pribumi dalam Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Pribumi (2007):

- Identifikasi diri sebagai masyarakat pribumi secara individu dan diterima oleh masyarakat pribumi tsb.
- Kontinuitas sejarah dengan masyarakat pra-kolonial atau pra-pemukim.
- Hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam sekitarnya.
- Sistem sosial, ekonomi atau politik yang berbeda.
- Bahasa, budaya, dan kepercayaan yang berbeda.
- Status bukan dominan dalam masyarakat.
- Memutuskan untuk memelihara dan mereproduksi lingkungan dan sistem leluhur mereka sebagai masyarakat dan komunitas yang berbeda.

Istilah itu sengaja tidak didefinisikan dalam Deklarasi. Masyarakat Pribumi telah menentang definisi formal di tingkat internasional, dengan menekankan perlunya fleksibilitas dan penghormatan terhadap hak untuk mendefinisikan diri mereka sendiri dalam konteks yang sangat bervariasi.

Masyarakat adat dapat disebut di berbagai negara sebagai “etnis adat minoritas”, “penduduk asli”, “suku pegunungan”, “bangsa minoritas”, “masyarakat asli”, “suku yang kurang beruntung”, atau “kelompok adat”, sementara beberapa masyarakat pribumi menggunakan istilah “Bangsa Pertama” atau “Masyarakat Mula-mula”.

Di sebagian besar negara, masyarakat adat merupakan minoritas. Namun, terlepas dari kondisi marginalisasi yang serupa, penduduk asli berbeda dengan menjadi etnis minoritas, seperti halnya hak-hak yang diperoleh dari menjadi masyarakat mula-mula (lihat Bagian 2).

Pengakuan Negara

Beberapa negara menentang konsep “Masyarakat Pribumi”, dengan alasan bahwa semua warganya adalah penduduk asli atau sulit untuk mendefinisikan siapa penduduk asli itu. Lainnya menganggap masyarakat pribumi sebagai etnis minoritas, tanpa memperhatikan gagasan dan hak-hak masyarakat pribumi. Pengakuan telah menjadi tantangan khusus di banyak negara di Asia dan Afrika, di mana beberapa pihak berpendapat bahwa pribumi berarti kehadiran sebelum penjajahan Eropa.

Di negara-negara di mana masyarakat pribumi diakui sebagai masyarakat yang berbeda, mereka terus berjuang agar hak-hak mereka diabadikan dalam hukum sehubungan dengan pengakuan konstitusional, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri. Meskipun demikian, gerakan global masyarakat pribumi terus menguat dan kerangka hak internasional terus berkembang dalam konteks regional dan nasional yang berbeda. Terlepas dari berbagai tantangan, banyak negara di Asia telah mengambil langkah untuk mengakui masyarakat adat, terutama sejak Deklarasi PBB 2007,





Seorang perempuan pribumi berjalan melewati kumpulan foto korban penghilangan paksa di kota Guatemala pada peringatan 12 tahun sejak laporan Komisi Kebenaran. Februari, 2011. (Photo oleh Johan Ordonez/AFP lewat Getty Images).

02

Masyarakat pribumi dan Hak Asasi Manusia

Masyarakat pribumi mengalami konsekuensi dari invasi sejarah dan penjajahan wilayah mereka. Pembangunan tidak hanya sering melupakan masyarakat pribumi, tetapi juga sering berdampak negatif terhadap hak dan kehidupan mereka. Masyarakat pribumi menghadapi diskriminasi karena perbedaan budaya, identitas dan cara hidup, sementara kemiskinan dan marjinalisasi yang tidak proporsional menambah pelanggaran hak asasi manusia. Trauma antargenerasi di antara penduduk pribumi didokumentasikan dengan baik.

Perlawanan dan kelangsungan hidup telah menjadi andalan strategi penduduk pribumi. Sementara ini tetap menjadi kasus bagi banyak komunitas masyarakat pribumi, gerakan hak-hak masyarakat pribumi global telah memperoleh kekuatan sejak tahun 1970-an, menawarkan dasar untuk hubungan berbasis hak-hak yang baru antara masyarakat pribumi dan negara.

Gerakan masyarakat pribumi global, dan perkembangan besar dalam hukum hak asasi manusia internasional

Sejak tahun 1970-an, gerakan masyarakat pribumi global yang signifikan telah mendorong perdebatan internasional tentang hak-hak masyarakat pribumi. Gerakan ini telah terlibat dengan masyarakat sipil, mekanisme internasional, dan badan-badan nasional dan regional. Pada tahun 1982, Kelompok Kerja untuk Masyarakat Pribumi dibentuk di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengupayakan dialog antara masyarakat pribumi dan negara-negara anggota untuk mengembangkan kerangka kerja berbasis hak internasional tentang masyarakat pribumi, termasuk dua instrumen internasional utama.

Konvensi Penduduk Pribumi dan Masyarakat Adat, 1989 (No.169)

Konvensi Masyarakat Pribumi dan Masyarakat Adat adalah satu-satunya konvensi

internasional tentang Hak-hak Masyarakat Pribumi yang terbuka untuk diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB. Hanya 23 Negara yang telah meratifikasi Konvensi tsb., termasuk hanya satu negara di Asia (Nepal), dengan 16 negara di Amerika Latin dan Karibia.

Konvensi tsb. menyerukan langkah-langkah untuk melindungi hak individu dan kolektif masyarakat pribumi dan masyarakat adat, untuk memastikan integritas mereka, untuk mendukung institusi mereka, dan untuk menghilangkan diskriminasi dan kesenjangan sosial-ekonomi. Kerangka utama Konvensi No. 169 adalah fokusnya pada partisipasi masyarakat pribumi dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme dan institusi yang sesuai. Ini juga berisi ketentuan tentang persamaan hak bagi perempuan pribumi dan perempuan adat.

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi, 2007

Sebuah tonggak dalam pengakuan hak-hak masyarakat pribumi dan pendorong perubahan lebih lanjut adalah Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Pribumi (UNDRIP), yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2007.

Lebih dari 20 tahun dialog intens, diskusi, negosiasi, lobi dan advokasi antara masyarakat pribumi dan negara menyebabkan sebagian besar negara anggota PBB mendukung deklarasi tsb. Deklarasi ini menetapkan kerangka universal standard minimum untuk kelangsungan hidup, martabat dan kesejahteraan masyarakat pribumi di dunia. Deklarasi ini menguraikan juga standard hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang berlaku untuk situasi khusus masyarakat pribumi. Ini adalah instrumen internasional pertama yang secara resmi mengakui hak masyarakat pribumi untuk menentukan nasib sendiri.

Deklarasi tersebut menjabarkan hak individu dan kolektif masyarakat pribumi di seluruh dunia sebagai masyarakat yang berbeda. Tema utama meliputi:

- Hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat pribumi secara individu dan masyarakat (Pasal 1-8; 33-34)
- Hak-hak dari masyarakat pribumi secara individu dan masyarakat untuk melindungi budaya mereka melalui kebiasaan, bahasa, pendidikan, media, dan agama (Pasal 9-15, 16, 25, dan 31)
- Hak-hak dari masyarakat pribumi atas jenis pemerintahan mereka sendiri dan pembangunan ekonomi (Pasal 17-21, 35-37)
- Hak kesehatan (Pasal 23-24)
- Perlindungan subkelompok, termasuk orang tua, perempuan, dan anak-anak (Pasal 22)

- Hak atas tanah, mulai dari kepemilikan (termasuk reparasi, atau pengembalian tanah, Pasal 10) hingga masalah-masalah lingkungan (Pasal 26-30 dan 32)

Mekanisme dukungan PBB untuk implementasi Deklarasi

Tiga mandat saling melengkapi, bertemu setiap tahun untuk mengkoordinasikan kegiatan dan berbagi informasi:

- Permanen Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Isu-Isu masyarakat pribumi, yang dibentuk pada tahun 2000.
- Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Pribumi, yang pertama kali ditunjuk pada tahun 2001.
- Mekanisme Pakar Hak-Hak Masyarakat Pribumi, yang dibentuk tahun 2007.

Sejumlah badan pemantau perjanjian lainnya memainkan peran penting dalam memajukan hak-hak masyarakat pribumi. Misalnya, Komite Hak Asasi Manusia, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, Komite Hak Anak, dan Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengembangkan badan yurisprudensi tentang hak-hak masyarakat pribumi bahkan sebelum deklarasi ini diterima.

Akhirnya, tinjauan berkala universal, di mana semua negara anggota PBB ditinjau oleh Dewan Hak Asasi Manusia untuk kinerja, kewajiban dan komitmen hak asasi manusia badan-badan dunia tsb., yang berkaitan dengan isu-isu masyarakat pribumi.

Menerjemahkan Hak Asasi Manusia Pribumi di tingkat nasional

Meskipun merupakan resolusi yang tidak mengikat, UNDRIP menjadi landasan bagi negara-negara untuk membentuk hubungan mereka dengan masyarakat pribumi. Ini telah menginformasikan dan mempengaruhi adopsi undang-undang, kebijakan, keputusan pengadilan dan pedoman operasional di semua tingkatan. Namun, kemajuan tidak merata di dalam dan di antara negara dan kawasan, dan kesenjangan besar tetap ada antara standar internasional dan kebijakan serta praktik nasional. Komisi kebenaran dan proses pengungkapan kebenaran lainnya dapat berperan dalam membantu menutup kesenjangan itu.

Pemerintah, sistem peradilan, lembaga hak asasi manusia nasional, dan masyarakat sipil, serta masyarakat adat, semuanya memiliki peran untuk melaksanakan UNDRIP di tingkat nasional dan lokal.

Perkembangan di PBB untuk mengakui dan mempromosikan hak-hak masyarakat pribumi

Membangun momentum gerakan global tentang hak-hak penduduk pribumi, inisiatif PBB untuk mempromosikan hak-hak masyarakat pribumi sejak 1990-an meliputi:



1993: Tahun Masyarakat Pribumi Sedunia, dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB.

Hari Internasional Masyarakat Pribumi Sedunia:

Pada tahun 1994, Majelis Umum PBB menetapkan 9 Agustus sebagai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia. Tanggal tersebut menandai pertemuan pertama Kelompok Kerja PBB untuk Penduduk Asli pada tahun 1982.

Dekade Internasional Pertama Masyarakat Pribumi Sedunia:

Majelis Umum PBB memproklamkan 1995-2004 sebagai Dekade Internasional Masyarakat Adat Dunia, dengan tujuan memperkuat kerjasama internasional di bidang-bidang seperti hak asasi manusia, lingkungan, pembangunan, pendidikan dan kesehatan.

Dekade Internasional Kedua Masyarakat Pribumi Sedunia:

Majelis Umum PBB mencanangkan 2005-2014 sebagai Dekade Internasional Kedua Masyarakat Adat Dunia. Tujuannya termasuk mempromosikan non-diskriminasi dan inklusi masyarakat adat dalam proses dan pengambilan keputusan di semua tingkatan; mendefinisikan kembali kebijakan pembangunan yang sesuai dengan budaya; mengadopsi kebijakan dan program yang ditargetkan untuk pengembangan masyarakat adat; dan mengembangkan mekanisme pemantauan yang kuat untuk meningkatkan kehidupan masyarakat pribumi.



Konferensi Dunia tentang Masyarakat Pribumi:

Pada bulan September 2014, Konferensi Dunia Masyarakat Adat yang pertama diadakan sebagai sesi pleno khusus Majelis Umum PBB. Para peserta berbagi perspektif dan praktik terbaik tentang realisasi hak-hak masyarakat adat, termasuk mengejar tujuan UNDRIP. Itu didahului pada tahun 2013 oleh Konferensi Dunia Perempuan Pribumi, untuk memastikan suara perempuan pribumi didengar.

Tahun Internasional Bahasa Pribumi:

Majelis Umum PBB menobatkan 2019 sebagai Tahun Internasional Bahasa Pribumi pada 2019, dan UNESCO serta Permanen Forum Hak-Hak Pribumi menyelenggarakan acara bersama.

Dekade Bahasa Pribumi yang Akan Datang (2022–2032):

Pada awal 2020 di Mexico City, sebuah acara tingkat tinggi yang diselenggarakan bersama oleh UNESCO dan Meksiko menyerukan satu dekade tentang bahasa Pribumi, dalam Deklarasi Los Pinos. Berdasarkan pelajaran Tahun Internasional Bahasa Pribumi (2019), Deklarasi ini mengakui pentingnya bahasa Pribumi untuk kohesi dan inklusi sosial, hak budaya, kesehatan dan keadilan. Ini juga menyoroti relevansinya dengan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian keanekaragaman hayati karena mereka mempertahankan pengetahuan kuno dan tradisional yang mengikat manusia dengan alam.



Hermannsburg Potters
Aboriginal Corp.,
Imankinyanga Lyatinga Unah
(Sejarah Kami), 2001, cat
polimer sintetis di atas kanvas,
3830 h x 2945 w mm. Dengan
izin Hermannsburg Potters
Aboriginal Corp., Northern
Territory.

03

Keadilan Transisional, Hak atas Kebenaran dan Mekanisme Pengungkapan Kebenaran

Apa itu keadilan transisional?

Keadilan transisional mengacu pada cara-cara di mana negara-negara yang muncul dari konflik dan rejim yang represi menangani pelanggaran hak asasi manusia dengan begitu banyak, sistematis, dan serius sehingga sistem peradilan normal tidak dapat merespons secara memadai.

Keadilan transisional bertujuan untuk membantu masyarakat melepaskan diri dari masa lalu yang penuh kekerasan dan memulihkan landasan moral. Ini mencari pengakuan bagi para korban dan promosi kemungkinan untuk rekonsiliasi dan demokrasi, membantu korban dan masyarakat pada umumnya berurusan dengan masa lalu untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di masa depan.

Keadilan transisional berakar pada dukungan terhadap martabat para korban dan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia. Keadilan transisional dapat dicapai melalui prakarsa yudisial dan non-yudisial, seperti penuntutan pidana, Komisi Kebenaran, program reparasi, reformasi institusional dan proyek peringatan masa lalu.

Tidak ada satu cara pun untuk menerapkan keadilan transisional, mengingat beragamnya konteks dan budaya di mana keadilan transisional dapat diterapkan. Namun, empat pilar keadilan transisional konsisten di seluruh konteks:

- Hak atas kebenaran.
- Hak atas keadilan.
- Hak atas reparasi/tuntutan ganti rugi.
- Jaminan tidak akan terulang kembali.

Apa itu hak atas kebenaran?

Hak atas kebenaran, terutama yang menjadi inti dari perangkat ini, berakar pada

hukum internasional tentang eksekusi mati, penghilangan paksa, orang hilang, penculikan anak, penyiksaan, dan pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya. Hak ini telah diakui oleh badan peradilan internasional, pengadilan regional dan nasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Unsur dari hak atas kebenaran

Sementara hak atas kebenaran terus berkembang, unsur-unsur intinya sudah mapan. Unsur-unsur tsb. termasuk hak untuk mencari dan memperoleh informasi tentang:

- Penyebab yang mengarah pada viktimisasi orang tersebut.
- Penyebab dan kondisi yang berkaitan dengan pelanggaran serius hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional.
- Kemajuan dan hasil investigasi.
- Keadaan dan alasan dilakukannya kejahatan tersebut.
- Keadaan di mana pelanggaran terjadi.
- Nasib dan keberadaan para korban, dalam kasus kematian atau penghilangan paksa.
- Identitas pelaku.

Ciri-ciri lain dari hak atas kebenaran:

- Hak atas kebenaran terkait erat dengan hak atas pemulihan yang efektif dan hak untuk memperoleh reparasi/ganti rugi, di antara hak-hak lainnya.
- Hak atas kebenaran tidak dapat dicabut. Itu tidak dapat diambil atau diberikan, ditangguhkan, dibatasi, atau ditolak dengan amnesti atau pembatasan lainnya.
- Negara berkewajiban untuk melestarikan bukti dokumenter untuk peringatan dan kenangan, dan untuk memastikan akses ke arsip dengan informasi tentang pelanggaran.

Siapa yang berhak atas kebenaran?

Korban dan kerabatnya atau wakilnya berhak atas kebenaran. Pengertian “korban” bisa bersifat individual dan kolektif.

Hak atas kebenaran juga memiliki dimensi kemasyarakatan: masyarakat berhak mengetahui kebenaran tentang dilakukannya kejahatan keji, serta keadaan dan alasan kejahatan tersebut, agar tidak terulang kembali di masa depan.

Hari Internasional untuk Hak atas Kebenaran

Hari Internasional untuk Hak atas Kebenaran Mengenai Pelanggaran HAM Berat dan untuk Martabat Korban diperingati pada 24 Maret.

Apa itu komisi kebenaran?

Tujuan

Komisi Kebenaran adalah salah satu mekanisme untuk pengungkapan kebenaran, biasanya dalam konteks transisi dari konflik atau represi ke perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Komisi Kebenaran pertama yang terkenal, Komisi Nasional Argentina untuk Orang Hilang, dibentuk pada tahun 1983. Sejak itu telah ada lebih dari 40 Komisi Kebenaran, masing-masing berakar pada masalah sejarah, sosial, politik, budaya dan hak asasi manusia yang muncul dari kasus-kasus tsb. dan ditangani .

Komisi Kebenaran adalah badan resmi non-yudisial dengan jangka waktu terbatas. Mereka dibentuk untuk mengetahui fakta, penyebab, dan akibat dari pelanggaran HAM masa lalu. Mereka umumnya berfokus pada pengalaman para korban, dengan perhatian khusus pada kesaksian mereka. Komisi Kebenaran sering menggunakan pendekatan multidisiplin untuk melengkapi kesaksian individu, menggunakan keahlian pengacara, sejarawan, sosiolog, antropolog, ahli statistik, psikolog, pakar komunikasi, dan disiplin ilmu lainnya. Komisi Kebenaran membantu memberikan pengakuan kepada korban, seringkali setelah periode stigmatisasi dan skeptisisme sosial yang berkepanjangan.

Komisi Kebenaran dapat berkontribusi pada penuntutan dan reparasi, membantu masyarakat yang terpecah mengatasi keheningan dan ketidakpercayaan, dan mengidentifikasi reformasi kelembagaan untuk mencegah pelanggaran baru. Fungsi utama Komisi Kebenaran adalah untuk berkontribusi pada pendidikan publik dan kesadaran akan pelanggaran di masa lalu, yang seringkali ditekan atau kurang dipahami. Mereka dapat membantu menciptakan narasi baru yang dibagikan sebagai dasar untuk perubahan yang berkelanjutan.

Konteks pendirian

Komisi Kebenaran biasanya dibentuk selama periode perubahan politik, seperti setelah berakhirnya rezim otoriter atau konflik bersenjata. Komitmen untuk membentuk Komisi Kebenaran sering dituangkan dalam perjanjian damai, negosiasi transisi ke demokrasi, dan dalam beberapa kasus, konstitusi baru, seringkali karena advokasi oleh asosiasi korban, pembela hak asasi manusia dan masyarakat sipil yang

lebih luas.

Komunitas adat baru-baru ini mengupayakan Komisi Kebenaran sebagai bagian dari strategi untuk mengatasi masa lalu dan mengamankan hak-hak mereka di masa depan, kadang-kadang dalam konteks mengakui kedaulatan dan penentuan nasib sendiri (lihat Studi Kasus, Australia).

Sebuah Komisi Kebenaran biasanya dibentuk oleh undang-undang yang menetapkan mandat dan kekuasaannya. Mereka dipimpin oleh komisaris, biasanya paling sedikit tiga orang, dan staf dari berbagai disiplin ilmu. Komisi Kebenaran dapat berupa lembaga nasional atau diberi mandat untuk memeriksa wilayah dan komunitas lokal (lihat Studi Kasus).

Komisi Kebenaran paling efektif sebagai bagian dari strategi keadilan transisional komprehensif yang mencakup reparasi, penuntutan, dan reformasi kelembagaan. Dengan memberikan temuan dan rekomendasi yang jelas, komisi dapat berkontribusi pada kebijakan baru dan menciptakan momentum sosial dan politik untuk inisiatif ini.

Kemitraan dan jaringan

Masyarakat sipil, seringkali termasuk komunitas agama, memiliki hubungan penting dengan Komisi Kebenaran, mengadvokasi penciptaan mereka, mendukung pekerjaan mereka, memperdalam keterlibatan publik, mendukung para korban, memantau kemajuan dan mendorong reformasi yang sedang berlangsung. Banyak komisi melibatkan media massa, masyarakat sipil, dan akademisi untuk memaksimalkan keahlian, jangkauan, dan dampak.

Proses pengungkapan kebenaran lainnya

Komisi Kebenaran adalah salah satu forum untuk menyampaikan kebenaran di antara banyak forum lainnya. Catatan sejarah tentang pelanggaran hak asasi manusia dapat muncul dari komisi penyelidikan, penyelidikan oleh badan-badan seperti lembaga hak asasi manusia nasional, pengumpulan sejarah lisan, lokasi kuburan massal, proyek artistik, pengembangan situs dan kegiatan peringatan, dan mekanisme resmi atau tidak resmi lainnya, di tingkat lokal atau nasional.

Di bawah ini adalah contoh mekanisme pengungkapan kebenaran; contoh spesifik negara dirinci di bagian Studi Kasus.

Komisi penyelidikan pemerintah

Pemerintah pada tingkat yang berbeda dapat membentuk komisi penyelidikan

dengan mandat untuk memeriksa masalah dan kerangka waktu tertentu dan untuk mengembangkan rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut. Komisi Negara Federal Australia untuk Kematian Orang Aborigin dalam Penahanan memeriksa kasus 88 pria dan 11 wanita yang meninggal dalam tahanan pada 1980-an, yang beroperasi dari 1987-1991. Lihat Studi Kasus.

Contoh lain adalah Penyelidikan Nasional Kanada tentang Perempuan dan Anak Perempuan Pribumi yang Hilang dan Dibunuh, yang beroperasi dari 2016-2019 mengikuti rekomendasi dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kanada. Lihat Studi Kasus.

Penyelidikan lembaga hak asasi manusia nasional

Lembaga hak asasi manusia nasional, atau KOMNAS HAM adalah badan domestik permanen yang otonom, biasanya dengan mandat yang luas. Mereka memainkan peran penting dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk dalam menjembatani hukum hak asasi manusia internasional, seperti **UNDRIPI**. Mereka dapat membantu menutup kesenjangan antara standar dan komitmen internasional dan praktik nasional. KOMNAS HAM sering membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat sipil, dan laporan serta rekomendasi mereka dapat menjadi jembatan bagi Pemerintah.

Pada tahun 2009, Komite Koordinasi Internasional KOMNAS HAM (sekarang Aliansi Global Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia) mendesak fokus yang lebih besar pada isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat adat. KOMNAS HAM juga memainkan peran yang berkembang dalam Permanen Forum PBB tentang Isu-Isu masyarakat pribumi. KOMNAS HAM telah menunjuk komisar Pribumi dengan mandat terfokus, yang telah memperkuat fokus mereka pada hak-hak Pribumi, seperti di Australia dan Selandia Baru. Pada tahun 2013, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menugaskan seorang Komisar sebagai Pelapor Khusus untuk masyarakat pribumi. KOMNAS HAM juga dapat berfungsi sebagai basis untuk proses pencarian kebenaran yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat, melalui pengaduan individu tentang pelanggaran hak asasi manusia serta penyelidikan yang lebih luas. Penyelidikan formal oleh KOMNAS HAM terhadap isu-isu spesifik yang terkait dengan hak-hak penduduk pribumi meliputi:

- Penyelidikan Nasional Australia tentang Pemisahan Anak-anak Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres dari Keluarga Mereka, dari 1995-1997. Penyelidikan oleh Komisi Hak Asasi Manusia dan Persamaan Kesempatan (sekarang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) meneliti pemindahan paksa anak-anak Aborigin dan Torres Strait Islander dari keluarga mereka selama periode abad kedua puluh yang berkepanjangan. Lihat Studi Kasus.

- Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) pada tahun 2011 melakukan Penyelidikan Hak Tanah Adat Penduduk Asli secara nasional setelah banyak keluhan tentang perampasan tanah dan mengikis hak tanah adat asli. Lihat Studi Kasus.
- Di Indonesia pada tahun 2014, komisi nasional hak asasi manusia, Komnas HAM, meluncurkan penyelidikan nasional pertamanya terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan konflik tanah yang melibatkan masyarakat pribumi. Lihat Studi Kasus.

Lembaga Nasional Hak-Hak Masyarakat Pribumi

Pada tahun 2009, Komite Koordinasi Internasional KOMNAS HAM mendesak negara-negara untuk mempertimbangkan lembaga-lembaga nasional tentang hak-hak masyarakat pribumi, yang diberi mandat untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak mereka sesuai dengan UNDRIP 2007. Dua contohnya adalah Komisi Nasional India untuk Suku Terpencil, yang didirikan berdasarkan Konstitusi, dan Komisi Nasional Masyarakat Adat di Filipina, yang dibentuk oleh undang-undang sebagai lembaga pemerintah utama yang terkait dengan masyarakat pribumi. Meskipun tidak dikenal dengan proses pengungkapan kebenaran, mereka dapat menjadi mitra penting atau penyelenggara di masa depan.

Investigasi masyarakat sipil dan inisiatif masyarakat

LSM, aktivis, dan media massa seringkali menjadi pihak pertama yang mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia, yang kemudian menjadi bagian dari advokasi untuk tindakan resmi. LSM masyarakat pribumi dan non-pribumi juga dapat menjadi jembatan efektif antara advokasi dan aksi lokal dan nasional. Masyarakat sipil, yang mendukung para korban pelanggaran, telah menjadi suara utama yang menyerukan komisi untuk menindaklanjuti rekomendasi mereka.

Di Kanada, jauh sebelum penyelidikan formal, Asosiasi Wanita Asli Kanada melakukan penelitian dan investigasi selama lima tahun dari tahun

2005 dalam proyek “Sisters in Spirit” (SIS). Proyek ini melakukan wawancara dan penelitian statistik yang membuktikan bahwa perempuan masyarakat pribumi menjadi korban secara tidak proporsional. SIS merilis sebuah laporan yang mendorong aktivis lebih lanjut oleh sekelompok organisasi yang terorganisir secara longgar. Kemudian, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kanada merekomendasikan pembentukan penyelidikan nasional resmi. Lihat Studi Kasus.

Di Papua,² Indonesia, dengan tidak adanya penerapan Undang-undang Otonomi Khusus oleh Pemerintah yang menyerukan pembentukan the International Center for Transitional Justice atau Pusat Keadilan Transisional yang bermitra dengan LSM lokal untuk mengembangkan proses pengungkapan kebenaran dengan perempuan pribumi. Lihat Studi Kasus. Lihat juga Studi Kasus di Australia untuk proses pengungkapan kebenaran yang dipimpin oleh komunitas dan masyarakat sipil.

-
2. Di dalam buku panduan ini, kami menggunakan kata “Papua” untuk menyebutkan baik Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat.

與國是
少參與
候選
議

孩子，
核廢料 交給你了



Climate change
Killing indigenous

台灣

2019 FRIDAYS FOR FUTURE taiwan

台灣站出來
週五為未來



Aktivis masyarakat pribumi berdemonstrasi di depan Gedung Legislatif Yuan di Taipei sebagai bagian dari gerakan perubahan iklim 'Jumat demi Masa Depan,' Mei 2019. (Photo oleh Craig Ferguson/LightRocket lewat Getty Images).

04

Perjuangan yang Lebih Luas untuk Hak-Hak Penduduk Pribumi: Apa Peran Pengungkapan Kebenaran?

Konteks dan strategi politik

Konteks khusus sangat penting untuk menentukan apakah dan proses pengungkapan kebenaran seperti apa yang dapat membantu komunitas masyarakat pribumi mewujudkan haknya, dan isu apa yang menjadi fokus. Apa tantangan utama hak asasi manusia, dan bagaimana kaitannya dengan aspirasi politik seperti pengakuan, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri? Bagaimana pelanggaran historis berhubungan dengan pelanggaran saat ini dan yang sedang berlangsung? Apa yang menjadi prioritas sebuah komunitas? Apa peluang dan hambatan sosial-politik untuk proses pengungkapan kebenaran? Undang-undang, institusi, dan perangkat hak asasi manusia lainnya apa yang akan mendukung sebuah proses? Siapa yang kemungkinan besar adalah sekutu? Apa yang akan diperoleh? Apakah secara fisik, psikologis dan budaya aman bagi masyarakat pribumi untuk berbagi cerita?

Lebih jauh lagi, proses pengungkapan kebenaran tidak dapat mencapai semua tujuan perjuangan setiap komunitas masyarakat pribumi untuk mewujudkan hak-hak mereka. Pertanyaan kuncinya adalah: peran apa yang dapat dimainkan oleh pengungkapan kebenaran dalam mencapai perjuangan hak-hak yang lebih luas di setiap situasi?

Strategi politik yang lebih luas dari komunitas pribumi harus menginformasikan keputusan tentang apakah mereka akan memulai atau berpartisipasi dalam proses pengungkapan kebenaran, bagaimana proses tersebut harus disusun, apa yang harus difokuskan, dan bagaimana proses itu harus dijalankan. Kejelasan tentang kemungkinan dan keterbatasan penting untuk keberhasilan proses, hasil dan tindak lanjut yang berkontribusi pada strategi politik dan hak asasi manusia yang lebih luas.

Untuk pembela hak asasi manusia non-Pribumi, serta lembaga-lembaga negara,

adalah penting bahwa inisiatif pengungkapan kebenaran muncul melalui konsultasi yang bermakna dengan lembaga-lembaga masyarakat pribumi, pemimpin dan masyarakat pribumi untuk menetapkan persetujuan bebas, yang didahulukan dengan informasi yang baik kepada mereka.

Deklarasi PBB tentang hak penduduk pribumi sebagai dasar untuk pengungkapan kebenaran

Sejak tahun 2007, kerangka hak asasi manusia internasional yang baru memandu tindakan negara terhadap masyarakat pribumi. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi (**UNDRIP**) menawarkan perlindungan kepada masyarakat pribumi dan panduan yang jelas bagi negara dan Pemerintah.

Kerangka kerja ini tidak ada selama gelombang awal Komisi Kebenaran pasca-konflik yang mempertimbangkan pelanggaran terhadap masyarakat pribumi, seperti yang terjadi di Guatemala, Paraguay dan Peru. Hari ini, **UNDRIP** harus memandu negara-negara dalam membangun proses pengungkapan kebenaran. Secara khusus, ini harus memastikan konsultasi dengan masyarakat pribumi tentang semua aspek dan tahapan proses tersebut untuk memastikan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan kepada mereka. Deklarasi tersebut juga harus memandu pembentukan mandat, struktur dan operasi Komisi Kebenaran yang berkaitan dengan masyarakat pribumi.

Mekanisme yang mendukung pelaksanaan **UNDRIP**, termasuk Permanen Forum PBB untuk Isu-Isu Masyarakat Pribumi, Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Pribumi, dan Mekanisme Ahli tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi juga dapat membantu proses pengungkapan kebenaran untuk menegakkan standard hak asasi manusia internasional bagi masyarakat adat.

Pengakuan dan penentuan nasib sendiri

Pengakuan adalah jantung dari perjuangan masyarakat pribumi di seluruh dunia. Penolakan hak untuk hidup sebagai masyarakat, untuk menentukan masa depan mereka sendiri, adalah akar dari generasi penyangkalan dan pelanggaran hak berikutnya. Sehingga, penentuan nasib sendiri mengalir dari pengakuan.

Komisi Kebenaran atau proses pengungkapan kebenaran lainnya yang melibatkan masyarakat pribumi harus memperkuat pengakuan, bukan mengurangnya. Tujuan negara adalah faktor kunci. Di negara-negara yang sedang bertransisi dari konflik dan pemerintahan otoriter, tujuan utama komisi kebenaran yang diciptakan negara seringkali adalah untuk menyatukan orang-orang untuk menciptakan narasi nasional baru yang mendukung masyarakat berbasis hak yang lebih inklusif. Kadang-

kadang digambarkan secara positif sebagai bagian dari proses pembangunan atau pembaruan bangsa, upaya ini dapat menimbulkan risiko bagi masyarakat adat.

Jika narasi inklusi menyerap masyarakat adat ke dalam satu identitas nasional yang dominan, maka proses pengungkapan kebenaran dapat memperparah pelanggaran sejarah dan penolakan hak untuk hidup sebagai masyarakat yang berbeda. Sebuah komisi kebenaran harus terlibat dengan masyarakat adat dalam kerangka **UNDRIP**: berdasarkan pengakuan sebagai masyarakat yang berbeda dengan hak terkait. Pengungkapan kebenaran harus memperkuat identitas dan hak yang berbeda ini, dengan cara yang memungkinkan pluralitas identitas dalam suatu negara bangsa.

UNDRIP menegaskan hak masyarakat pribumi untuk menegaskan kewarganegaraan mereka sementara juga mempertahankan hak kewarganegaraan negara tempat mereka tinggal. Sebuah Komisi Kebenaran harus terlibat dengan masyarakat pribumi berdasarkan hubungan antar bangsa-bangsa.

Keuntungan dari Komisi Kebenaran untuk hak-hak masyarakat pribumi

Komisi kebenaran sering menggunakan metodologi fleksibel yang melengkapi kesaksian individu dengan penelitian multi-disiplin. Adalah umum bagi Komisi Kebenaran untuk mempekerjakan atau bermitra dengan pengacara, sejarawan, sosiolog, antropolog, spesialis forensik, ahli statistik, psikolog, seniman, dan spesialis lainnya. Komisi Kebenaran umumnya tidak terbatas pada definisi legalistik, kasus individual, atau batasan bukti.

Pendekatan multidisiplin ini telah membantu Komisi Kebenaran menyelidiki konteks dan penyebab kekerasan dan pelanggaran hak pada saat yang sama dengan merekam kesaksian dan pengalaman individu. Pendekatan yang lebih panjang dan lebih luas ini kemudian dapat mengungkap akar penyebab penolakan kontemporer serta pelanggaran hak-hak masyarakat pribumi. (Lihat Studi Kasus komisi kebenaran pasca-konflik dan penyelidikan tematik tentang pelanggaran terhadap masyarakat pribumi).

Mengadaptasi metodologi Komisi Kebenaran tradisional untuk pencarian kebenaran masyarakat pribumi

Dua adaptasi menonjol untuk pencarian kebenaran yang efektif tentang hak-hak masyarakat pribumi:

- Mengingat jangka waktu yang lebih lama, bahkan kembali ke masa pemukim kolonial dan pembentukan negara-bangsa modern. Penyimpangan dari periode penyelidikan yang lebih kontemporer, yang menjadi fokus sebagian

besar Komisi Kebenaran, akan membutuhkan adaptasi metodologi serta keterbukaan tentang sumber bukti, termasuk sejarah lisan, penceritaan, dan bentuk ekspresi tradisional lainnya.

- Meneliti pelanggaran hak kolektif maupun hak individu. UNDRIP menunjukkan perluasan standard hak asasi manusia tradisional melalui pengakuan hak yang dipegang secara kolektif oleh masyarakat. Banyak pelanggaran yang dialami oleh masyarakat pribumi berkaitan dengan pengalaman dan hak kolektif: penargetan kekerasan sebagai sebuah kelompok; perampasan dari tanah komunal, wilayah dan sumber daya yang dimiliki secara kolektif; dan pelanggaran hak-hak sosial, budaya dan ekonomi yang dimiliki secara kolektif, seperti melalui pelarangan bahasa dan praktek budaya. Adaptasi ini akan menjadi tantangan baru bagi komisi kebenaran, yang secara umum berfokus pada hak-hak individu, dan sebagian besar pada hak-hak sipil dan politik, terutama kekerasan terhadap individu.

Reaksi balik, pengaturan standard dan pendidikan

Menegaskan identitas nasional masyarakat pribumi sebagai berbeda dari negara-bangsa dapat dilihat sebagai kontroversial. Aktor politik dapat menafsirkan dukungan untuk penentuan nasib sendiri sebagai mendorong separatisme. Ada risiko reaksi politik, komunitas, dan bahkan kekerasan.

Keamanan untuk pengungkapan kebenaran adalah sangat penting: Apakah secara fisik, psikologis dan budaya aman bagi masyarakat pribumi untuk berpartisipasi dalam pengungkapan kebenaran? Masyarakat pribumi secara historis menjadi sasaran kekerasan oleh negara dan aktor non-negara, dan praktek ini berlanjut di banyak negara, menyebabkan suatu warisan ketidakpercayaan yang mendalam. Pemimpin masyarakat pribumi dan masyarakat perlu menilai risiko ini dalam setiap konteks, dan setiap proses pengungkapan kebenaran di mana harus memberlakukan pertimbangan ini sebagai prioritas utama.

Dalam mengelola reaksi balik, Komisi Kebenaran dapat berfungsi sebagai penjelas dan pendidik di masyarakat luas. Ini dapat berkontribusi pada kondisi yang lebih menguntungkan untuk memahami dan menerima hak-hak masyarakat pribumi. Sebuah komisi juga dapat membantu menetapkan standar baru, khususnya dengan membawa kerangka hak asasi manusia internasional untuk masyarakat pribumi ke dalam konteks nasional.

Agenda hak masyarakat pribumi: elemen umum di seluruh dunia

Ada kesamaan mencolok antara isu-isu hak yang dihadapi masyarakat pribumi secara beragam di seluruh dunia. Adalah berguna untuk mempertimbangkannya

dalam menilai apa dan bagaimana pengungkapan kebenaran dapat membantu mengatasi situasi ini dan mengamankan perlindungan dan realisasi hak-hak masyarakat.

Pengakuan dan penentuan nasib sendiri

Mendasari perjuangan masyarakat pribumi untuk bertahan hidup dan hak asasi manusia adalah tekad untuk eksis sebagai masyarakat yang berbeda dengan hak yang ditentukan, termasuk hak kolektif sebagai masyarakat. Hak dasar atas pengakuan ini ditolak dalam perluasan kerajaan-kerajaan waktu lalu, penciptaan masyarakat kolonial, dan pembentukan negara-bangsa modern, yang menerapkan kebijakan kekerasan massal, perampasan tanah, penindasan budaya, dan asimilasi paksa. Penentuan nasib sendiri berarti pengakuan ini disertai dengan jaminan bahwa masyarakat pribumi memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang mendasar bagi kehidupan mereka.

Kebijakan perampasan dan asimilasi modern tetap menjadi tantangan utama bagi banyak masyarakat pribumi. Banyak bagian di Asia, keengganan negara untuk mengakui penerapan konsep masyarakat pribumi tetap menjadi hambatan utama dan kritis untuk pengakuan jutaan orang. Bahkan di negara-negara di mana masyarakat adat diakui seperti itu, seperti Australia, ada perjuangan berkelanjutan untuk menerjemahkan pengakuan itu menjadi pengakuan hukum atas kedaulatan serta jaminan penentuan nasib sendiri.

Di sebagian besar negara, pengakuan dan penentuan nasib sendiri merupakan inti dari perjuangan masyarakat pribumi untuk mengamankan bentuk koeksistensi berbasis hak dalam negara-bangsa modern. Untuk sejumlah masyarakat pribumi yang lebih terbatas, pengakuan dan penentuan nasib sendiri mungkin berarti mendirikan negara yang merdeka penuh.

Hak atas tanah, wilayah dan sumber-sumber daya

Tanah dan sumber daya sangat penting bagi masyarakat pribumi, sebagai sumber tidak hanya pendapatan tetapi juga identitas dan kehidupan itu sendiri. Tradisi masyarakat pribumi tentang hak kolektif atas tanah dan sumber daya kontras dengan model kepemilikan dan pembangunan individu modern yang dominan.

Penjajah Eropa menggunakan sejumlah konsep untuk membenarkan perampasan tanah dari masyarakat adat. Doktrin Penemuan yang dikeluarkan oleh Paus pada tahun 1493 digunakan untuk membenarkan klaim oleh kerajaan dan penjelajah Kristen atas tanah yang diduduki dari orang non-Kristen selama era yang disebut orang Eropa “Zaman Penemuan”, saat di mana mereka berlomba untuk mengklaim tanah di “Dunia Baru”. Spanyol kemudian menerapkan doktrin **Regalia** di koloni

mereka, yang menyatakan bahwa gelar harus dilacak ke mahkota Spanyol, sebagai dasar untuk merampas tanah penduduk pribumi dari tanah mereka. Inggris juga menggunakan konsep **terra nullius**, atau tanah kosong, menolak untuk mengakui pendudukan dan kepemilikan tanah masyarakat pribumi. Amerika Serikat dan Kanada yang baru merdeka membangun pembenaran ini untuk penolakan hak atas tanah adat, bahkan ketika mereka memasuki perjanjian dengan masyarakat pribumi.

Pada tahun 2012, Permanen Forum PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi memilih tema “Doktrin Penemuan: dampaknya yang bertahan lama terhadap masyarakat pribumi dan hak untuk mendapatkan ganti rugi atas penaklukan di masa lalu.” Doktrin tersebut digambarkan sebagai dasar dari pelanggaran hak asasi manusia masyarakat pribumi.

Secara historis, dan hari ini di banyak belahan dunia, tidak diakuiinya hak kolektif atas tanah dan sumber daya yang mengarah kepada perampasan tanah dan kerusakan dari pembangunan berskala besar serta ekstraksi sumber daya oleh kepentingan negara maupun swasta.

Di Asia, serta di tempat lain, kurangnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat pribumi atas tanah dan sumber daya alam menyebabkan ketidakamanan dan kerentanan lahan dan juga merupakan akar penyebab utama kekerasan dan konflik. Pengusuran paksa, pemindahan dan pelanggaran sering dikaitkan dengan militerisasi atau penegakan kepentingan ekonomi swasta dan kebijakan pembangunan lainnya. Pembela hak asasi manusia pribumi sering menjadi sasaran dalam pelanggaran ini.

Konflik bersenjata dan militerisasi

Masyarakat pribumi sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia selama konflik. Mereka sering tinggal di wilayah terpencil yang sangat militeristik seperti Papua di Indonesia, Nagaland di India, Mindanao di Filipina, dan sebagian Kolombia. Selain itu, undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh Pemerintah-pemerintah Asia dalam perang global melawan terorisme seringkali mengakibatkan pelanggaran hak-hak masyarakat adat.

Kemiskinan: hak budaya, sosial dan ekonomi

Masyarakat pribumi merupakan hampir 19% dari kemiskinan ekstrim dunia dan hampir tiga kali lebih mungkin berada dalam kemiskinan ekstrim. Akses ke pekerjaan, pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas baik merupakan hambatan utama bagi masyarakat pribumi. Kurangnya pengakuan terhadap

masyarakat pribumi, dan kegagalan selanjutnya untuk mengumpulkan data serta menganalisis kondisi masyarakat, terus menghambat pemberian layanan dan realisasi atas hak-hak ini.

Perampasan tanah dan sumber daya secara historis dan saat ini, perusakan budaya, dan pelanggaran serius lainnya terhadap hak-hak individu dan kolektif menyebabkan banyak dari kemiskinan multi-generasi ini dan penolakan terhadap hak-hak budaya, sosial dan ekonomi. Analisis masyarakat pribumi juga mengidentifikasi trauma antargenerasi sebagai kekuatan pendorong di balik marginalisasi dan penderitaan modern.

Akses terhadap keadilan dan diskriminasi oleh sistem peradilan

Pengalaman masyarakat pribumi terhadap sistem peradilan seringkali sangat negatif, dan mengarah pada pelanggaran lebih lanjut atas hak-hak mereka. Rasisme, diskriminasi, dan pembuatan profil semuanya berkontribusi pada krisis bagi banyak komunitas pribumi. Di banyak negara, praktek modern ini merupakan perpanjangan dari sasaran sistem penegakan hukum sejak awal masa kolonial. Misalnya, di Australia keterwakilan masyarakat pribumi yang berlebihan, termasuk anak-anak, dalam sistem peradilan merupakan krisis yang sudah berlangsung lama.

Perubahan iklim

Meskipun memiliki salah satu jejak karbon terkecil, masyarakat pribumi menanggung beban dampak perubahan iklim karena ketergantungan mereka pada, dan hubungan dekat, dengan lingkungan dan sumber dayanya. Perubahan iklim memperburuk kesulitan yang dihadapi masyarakat pribumi, termasuk marginalisasi politik dan ekonomi, hilangnya tanah dan sumber daya, pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi dan pengangguran.

Perempuan pribumi

Perempuan pribumi menanggung dampak khusus dan peningkatan kerentanan dari hilangnya mata pencaharian tradisional, pengungsian, konflik dan meningkatnya kemiskinan, berdasarkan gender dan etnis mereka. Akses ke layanan sosial, terutama perawatan kesehatan, sering kali terhalang oleh status hukum nasional yang tidak memadai. Penculikan pengantin, pernikahan paksa dan kekerasan dalam rumah tangga juga masih bertahan di beberapa masyarakat pribumi. **UNDRIP** secara khusus berfokus pada hak-hak perempuan pribumi (Pasal 22).

Hak kolektif dan hak individu

Menyadari bahwa masyarakat adat sering mengatur masyarakat mereka sebagai sebuah kelompok, **UNDRIP** menegaskan hak kolektif ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hukum hak asasi manusia internasional. Pengalaman telah menunjukkan bahwa kecuali hak kolektif masyarakat pribumi dihormati, maka budaya seperti itu dapat hilang melalui asimilasi paksa ke dalam masyarakat yang dominan. Mengakui hak kolektif berimplikasi pada hak atas tanah, wilayah dan sumber daya, budaya, pengetahuan tradisional, dan integritas struktur masyarakat serta cara mengorganisir masyarakat.





Betty Adii, Behind Those Big Closed Doors (Di Belakang Pintu Tertutup), 2021, Cat akrilik dan minyak di atas panel kayu, 32 x 39 cm. Indonesia, Kolektif Uneido & Asia Justice and Rights.

05

Memahami Pengalaman Khusus Perempuan

Perempuan pribumi menghadapi marginalisasi ganda oleh budaya dominan karena kepribumian dan menjadi perempuan. Fakta ini membutuhkan upaya khusus dalam proses pengungkapan kebenaran untuk melibatkan perempuan secara bermakna dan memberi mereka ruang untuk mengatakan kebenaran mereka. UNDRIP juga menyerukan langkah-langkah khusus untuk melindungi hak-hak perempuan pribumi.

Dalam dokumen ini, gender dipertimbangkan berdasarkan 1) peran pencarian kebenaran dalam memahami pengalaman khusus perempuan dan 2) memaksimalkan partisipasi bermakna perempuan dalam proses pengungkapan kebenaran. Kami mengakui bahwa studi dan analisis gender melibatkan konsep dan praktek yang lebih luas, beberapa di antaranya berada di luar cakupan panduan ini.

Kami mengambil beberapa pelajaran dari pengalaman dengan proses pengungkapan kebenaran, menyoroti pentingnya keterlibatan keahlian gender mulai dari proses konsepsi dan desain melalui semua tahapan implementasi.

Kebeneran apa dan kebenaran siapa yang dicari?

Banyak Komisi Kebenaran menghadapi kritik karena tidak cukup terlibat dengan bagaimana perempuan mengalami konflik dan rezim represif, dan karena itu gagal untuk mendokumentasikan pengalaman ini secara memadai dalam narasi yang dihasilkan. Kegagalan ini memperparah ketidaktampakan dan dapat mengecualikan perempuan dari rekomendasi yang mengikuti narasi kebenaran, memperburuk kerentanan mereka terhadap pelanggaran lebih lanjut.

Kebeneran apa?

Setiap Komisi Kebenaran harus memutuskan pelanggaran hak asasi manusia mana yang menjadi fokus, tergantung pada konteks konflik dan represi, serta waktu dan

sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan mandatnya. Tidak semua isu penting dapat tercakup secara memadai.

Secara khusus, Komisi Kebenaran telah dikritik dalam perlakuan mereka terhadap pelanggaran terhadap perempuan. Salah satu kritik terhadap Komisi Kebenaran pasca-konflik adalah bahwa mereka cenderung berfokus pada pelanggaran hak-hak sipil dan politik, serta khususnya pelanggaran serius terhadap tubuh, seperti pembunuhan, penghilangan, penyiksaan dan kekerasan seksual, dengan mengorbankan pelanggaran hak lainnya. Akibatnya, Komisi Kebenaran ini membentuk hierarki hak yang mengabaikan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya, yang sangat terpengaruh selama konflik dan yang dapat berdampak tidak proporsional pada perempuan.

Ini adalah terobosan bagi Komisi Kebenaran untuk secara eksplisit fokus pada kekerasan seksual, mengikuti advokasi global pada 1990-an oleh organisasi perempuan. Advokasi ini mengakibatkan PBB mengambil berbagai inisiatif terkait dengan perempuan, agenda perdamaian dan keamanan serta keadilan bagi perempuan yang selamat. Kemajuan tersebut sangat penting mengingat sejarah keheningan dan kurangnya akuntabilitas atau keadilan atas kejahatan ini di hampir semua negara yang terkena dampak konflik.

Namun, kekerasan seksual saja tidak mencakup cara-cara yang kompleks dan multidimensi di mana perempuan mengalami pelanggaran. Dikatakan bahwa komisi perlu bergerak melampaui insiden individu kekerasan seksual dalam konflik. Mereka harus mengatasi konteks ketidaksetaraan yang memfasilitasi pelanggaran-pelanggaran ini, serta kontinum kekerasan terhadap perempuan dari periode konflik hingga pasca-konflik. Perempuan dalam proses pengungkapan kebenaran masyarakat sipil Papua menekankan kebutuhan ini. Mandat penyelidikan resmi Kanada terhadap Perempuan dan Anak Perempuan Pribumi yang Hilang dan Dibunuh secara eksplisit dalam mempertimbangkan segala bentuk kekerasan.

Pertimbangan tentang kebenaran apa yang dicari dengan dampak khusus pada pengungkapan kebenaran perempuan meliputi:

- Bentuk kekerasan terhadap perempuan apa saja, termasuk namun tidak terbatas pada kekerasan seksual, yang dipertimbangkan.
- Apakah akar penyebab kerentanan perempuan terhadap kekerasan ditangani.
- Apakah pencarian kebenaran termasuk pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, di mana perempuan dapat terpengaruh secara tidak proporsional.
- Tingkat pencarian kebenaran dalam pelanggaran hak-hak kolektif, yang merupakan bagian integral dari hak-hak penduduk pribumi dan yang membuka jalan bagi pengungkapan kebenaran perempuan.

Kebenaran siapa?

Mandat komisi kebenaran, bagaimana hal itu ditafsirkan, dan bagaimana komisi itu dipimpin dan dijalankan dapat mempengaruhi pengungkapan kebenaran perempuan. Komisi Kebenaran awal, seperti yang ada di Argentina dan Chili, tidak banyak berfokus pada isu gender. Generasi berikutnya, di negara-negara seperti Guatemala, Afrika Selatan, dan Peru memberikan perhatian khusus pada gender, meskipun mandat mereka tidak secara tegas menyerukan hal ini. Kemudian, di negara-negara seperti Haiti, Sierra Leone, dan Timor-Leste, kekerasan gender atau seksual secara eksplisit dimasukkan ke dalam mandat, dan topik-topik ini diidentifikasi sebagai jalan investigasi yang kritis.

Memasukkan keahlian gender ke dalam semua tahap komisi kebenaran – desain mandat, interpretasi dan pengembangan program, penjangkauan, operasi, penelitian, analisis informasi dan penulisan laporan – akan membantu memastikan bahwa pengungkapan kebenaran perempuan memainkan peran utama. Lebih lanjut, penting untuk mempertimbangkan penelitian bahwa pengalaman perempuan sering kali dikecualikan dari catatan resmi dan narasi sejarah, sebuah poin yang diperparah untuk perempuan pribumi.

Keahlian, serta kemitraan dengan organisasi dan akademisi perempuan pribumi dan non pribumi, dapat membangun kapasitas untuk mencari kebenaran tentang pengalaman perempuan. Tanpa langkah-langkah proaktif, maka suara dan cerita yang ditekan secara historis ini mungkin tetap tidak terdengar dan tidak didokumentasikan.

Peluang dan metode untuk memfasilitasi pencarian kebenaran dan keterlibatan dengan perempuan

Ada peluang untuk memperkuat keterlibatan dengan perempuan di setiap fase proses pengungkapan kebenaran: konsepsi, penetapan mandat, persiapan, penunjukan kepemimpinan dan staf, penjangkauan, implementasi, penulisan laporan, serta tindak lanjut. Jika peluang ini terlewatkan, ada risiko tinggi bahwa perempuan dan pengalaman perempuan akan tertinggal dari narasi serta rekomendasi tindak lanjut yang muncul. Peluang untuk meningkatkan pendekatan gender meliputi:

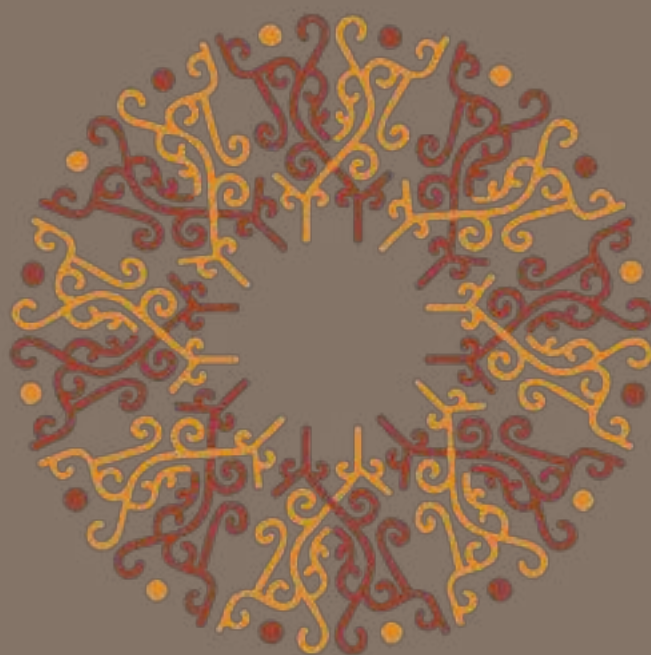
- **Negosiasi untuk mengakhiri konflik atau represi:** Banyak Komisi Kebenaran disusun selama perjanjian damai atau negosiasi politik lainnya. Sama seperti konflik bersenjata yang didominasi oleh laki-laki, demikian pula perdamaian dan negosiasi politik. Partisipasi perempuan, dan khususnya perempuan pribumi, dalam proses semacam itu merupakan tantangan besar yang harus dihadapi perempuan untuk mencapai hasil yang adil, termasuk syarat dan fokus

Komisi Kebenaran.

- **Konsultasi:** Keputusan untuk menetapkan proses pengungkapan kebenaran dapat dipertimbangkan di luar konteks konflik bersenjata baru-baru ini, dengan fokus pada hak-hak masyarakat pribumi, seperti di negara-negara Skandinavia dan Australia. Dalam kasus seperti itu, konsultasi harus mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan perempuan pribumi dikonsultasikan dengan benar, sejalan dengan UNDRIP.
- **Pembuatan mandat:** Baik melalui negosiasi damai atau proses legislatif, fase konsultatif sering kali akan menentukan mandat resmi dan legal dari Komisi Kebenaran sering kali melalui undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Perempuan cenderung kurang terwakili dalam proses parlementer, sebuah kelemahan yang harus diatasi dan dikurangi. Sama pentingnya untuk melibatkan masyarakat adat dan organisasi perempuan lainnya untuk membantu dalam berkonsultasi dengan perempuan dan membentuk mandat.
- **Badan Penasihat:** Badan atau jaringan penasihat yang berkelanjutan dari para perempuan dan organisasi masyarakat pribumi yang lainnya dapat beroperasi untuk kehidupan komisi.
- **Pemilihan komisioner:** Perempuan pribumi harus cukup terwakili dalam kepemimpinan Komisi Kebenaran.
- **Pemilihan staf:** Perempuan pribumi harus dimasukkan dalam posisi teknis (seperti penjangkauan masyarakat, dukungan korban, pengambil pernyataan, analisis data, penulis laporan) dan bidang keahlian gender tertentu untuk memastikan kapasitas untuk memahami masalah, membentuk tanggapan, dan cukup terlibat dengan perempuan pribumi. Komisi juga membutuhkan kapasitas linguistik untuk berhubungan dengan perempuan pribumi yang tidak fasih atau tidak bisa membaca bahasa resmi suatu negara.
- **Penafsiran mandat:** Pada tahap awal, komisioner memutuskan jenis pelanggaran apa yang menjadi fokus dan di mana mengalokasikan waktu dan sumber daya yang langka. Mereka harus mempertimbangkan bagaimana memeriksa hak-hak sosial, ekonomi dan budaya, hak-hak kolektif dan penyebab-penyebab yang mendasari kekerasan.
- **Pelatihan dan penyadaran:** Pelatihan untuk komisioner dan staf harus memastikan pendekatan gender secara menyeluruh.
- **Penjangkauan:** Upaya khusus harus ditujukan untuk menjangkau dan melibatkan perempuan pribumi, termasuk perempuan yang berpotensi terisolasi dan tinggal di komunitas terpencil atau, misalnya, LGBTQI atau perempuan penyandang disabilitas. Kemitraan dengan organisasi perempuan dan organisasi berbasis masyarakat dapat menjadi penting untuk mencapai hal ini.
- **Metodologi pencarian kebenaran:** Meskipun tidak seformal lembaga peradilan, Komisi Kebenaran dapat memiliki aspek semi-yudisial. Melalui konsultasi dan kemitraan dengan organisasi perempuan, komisi harus mengembangkan

metode yang fleksibel dan sensitif untuk memungkinkan perempuan menceritakan kisah mereka. Ini mungkin termasuk pengambilan pernyataan individu, bercerita kolektif, dan bentuk ekspresi tradisional dan artistik. Metode sensitif gender dan sesuai budaya dapat membantu perempuan menceritakan kembali pengalaman traumatis, termasuk yang membawa stigma sosial seperti kekerasan seksual.

- **Dukungan psikososial:** Kapasitas dan kemitraan yang memadai harus memberikan dukungan psiko-sosial kepada perempuan sebelum, selama dan setelah mereka bersaksi untuk komisi. Ini bisa menjadi tantangan praktis utama ketika sumber daya terbatas, terutama di komunitas terpencil.
- **Analisis data:** Sebuah komisi harus memiliki keahlian yang memadai untuk menganalisis informasi yang dikumpulkan melalui kacamata gender, sehingga narasi dan rekomendasi tindak lanjut yang muncul mencerminkan pengalaman dan kebutuhan perempuan di masa depan.
- **Rekomendasi:** Konsultasi dengan organisasi dan pemimpin perempuan harus membentuk rekomendasi untuk memenuhi kebutuhan perempuan di masa depan, dan memantau pelaksanaannya.
- **Tindak lanjut:** Rencana untuk institusi-institusi dan proses tindak lanjut harus disusun untuk mendorong kepemimpinan dan partisipasi perempuan pribumi yang berkelanjutan.





Dua perempuan dari Generasi Yang Dicuri di Festival Yeperenye, Alice Springs, NT 2000 © Juno Gemes Archive © Juno Gemes/Copyright Agency, 2021.



06

Metode untuk Partisipasi yang Berarti dalam Proses Pengungkapan Kebenaran

Merancang pendekatan yang berfokus pada manusia

Salah satu keuntungan Komisi Kebenaran dibandingkan proses peradilan adalah fleksibilitasnya dalam berinteraksi dengan masyarakat, terutama para korban pelanggaran. Sementara sebuah komisi mempertahankan pentingnya proses resmi, ada kapasitas yang lebih besar untuk pendekatan yang berfokus pada manusia untuk melibatkan individu dan komunitas. Yang penting bagi masyarakat pribumi bahwa pendekatan ini dapat mencakup cara-cara menyampaikan kebenaran yang sesuai dengan budaya berbeda dari praktik budaya yang dominan. Munculnya proses yang dipimpin oleh masyarakat pribumi dapat memperluas kemungkinan ini lebih jauh.

Proses pengungkapan kebenaran harus memutuskan bagaimana melibatkan korban pelanggaran, komunitas mereka, dan masyarakat luas. Pendekatannya bisa sangat bervariasi, mulai dari penelitian pustaka hingga kegiatan berbasis komunitas, melibatkan masyarakat sipil dan media massa untuk memperluas jangkauan.

Proses harus relevan, bermakna, dan menghormati komunitas masyarakat pribumi. Mereka harus membangun hubungan yang bermakna pada tingkat individu dan komunitas, baik karena alasan budaya dan karena mereka mungkin melibatkan hak-hak kolektif.

Sejumlah elemen sangat penting ketika memungkinkan partisipasi yang berarti, terutama oleh masyarakat pribumi:

- Siapa yang mencari kebenaran
- Kebenaran apa yang sedang dicari
- Bagaimana kebenaran dicari
- Di mana kebenaran dicari
- Apa yang terjadi pada kebenaran
- Peran masyarakat non-pribumi, lembaga, organisasi dan sektor bisnis
- Berbagi antargenerasi

Siapa yang mencari kebenaran itu penting

Masyarakat pribumi di seluruh dunia telah memiliki pengalaman buruk dengan berbagai Pemerintah dan proses resmi untuk waktu yang lama. Polisi, sistem hukum dan peradilan telah berada di garis depan kebijakan perampasan dan asimilasi negara. Oleh karena itu, status, sifat, dan susunan badan pencari kebenaran akan menentukan legitimasi, kredibilitas, dan keterpercayaannya dengan masyarakat pribumi.

Sebuah komisi yang merupakan lembaga resmi negara harus berkonsultasi dengan masyarakat pribumi untuk memastikan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan sesuai dengan **UNDRIP**. Konsultasi semacam itu harus dilakukan di semua tahap, termasuk keputusan untuk bergerak maju dengan proses pengungkapan kebenaran, rancangan mandat, penunjukan pimpinan dan staf, dan operasionalnya. Memastikan peran masyarakat pribumi dalam mengarahkan komisi juga penting, misalnya melalui dewan penasihat masyarakat pribumi atau komite pengarah. Komisi Kebenaran Maine-Wabanaki di Amerika Serikat disahkan bersama oleh lima kepala suku masyarakat pribumi dan Gubernur Negara Bagian. Lihat Studi Kasus.

Keragaman dalam masyarakat adat juga harus tercermin dalam komisi tersebut. Tidak mungkin untuk mewakili keragaman penuh kebangsaan dan kelompok bahasa pribumi dalam suatu komisioner sebenarnya dari suatu proses, tetapi komisi tersebut harus terlibat secara bermakna dengan semua negara dan komunitas yang relevan melalui staf, kemitraan, atau strategi lainnya. Keterwakilan gender yang memadai dalam kepemimpinan dan kepegawaian komisi juga mengirimkan sinyal penting kepada perempuan yang mungkin berpartisipasi, dan merupakan dasar bagi kapasitas komisi.

Terlibat dengan komunitas terpencil merupakan tantangan bagi banyak proses pencarian kebenaran yang melibatkan masyarakat pribumi. Untuk menghindari kesan operasional yang “terbang-masuk dan terbang-keluar” yang jauh, sebuah komisi dapat melakukan penjangkauan lebih awal, bermitra dengan kepemimpinan dan kelompok masyarakat setempat, dan membuat masyarakat tetap terlibat setelah pengungkapan kebenaran setempat. Media massa masyarakat pribumi dapat memainkan peran penting, didukung oleh komisi.

Kebenaran siapa yang dicari itu penting

Untuk menghindari marginalisasi lebih lanjut, perempuan pribumi dan orang-orang terpinggirkan lainnya membutuhkan perencanaan yang cermat, kejelasan tentang siapa yang ingin dijangkau oleh komisi, dan langkah-langkah yang sesuai. Misalnya, memasukkan kepemimpinan perempuan dalam sebuah komisi, staf dengan keahlian gender, dan kesetaraan dalam staf yang dapat membantu mengarahkan komisi

dan memberinya keterampilan untuk memastikan penyertaan perempuan yang setara dalam proses. Upaya ini sangat penting karena institusi dan proses hukum patriarki telah membuat perempuan pribumi menghadapi marginalisasi ganda dalam banyak interaksi di masa lalu.

Proses-proses ini juga harus memastikan keterlibatan yang memadai dengan orang-orang yang tinggal di komunitas terpencil, orang-orang LGBTQI, orang-orang cacat, orang tua, pemuda, dan orang-orang terpinggirkan lainnya.

Bagaimana kebenaran dicari itu penting

Keamanan

Menciptakan tempat dan proses yang aman untuk berbagi pengalaman menyakitkan merupakan prioritas utama bagi Komisi Kebenaran, mengingat pengalaman mengancam yang biasanya dialami korban dengan agen negara, tidak terkecuali tokoh dan lembaga hukum dan peradilan. Masyarakat pribumi sering mengalami para agen dan institusi sebagai garis depan kebijakan perampasan dan asimilasi paksa.

Proses pengungkapan kebenaran mungkin merupakan pertama kalinya banyak orang pribumi berbagi cerita di luar keluarga dekat mereka, dan kebutuhan akan keamanan fisik, psikologis, dan budaya tidak dapat disepelekan.

Masyarakat pribumi mungkin menghadapi ancaman fisik ketika datang untuk bersaksi, memaksa sebuah komisi untuk menilai apakah komisi tersebut secara realistis dapat menjamin keselamatan saksi. Langkah-langkah harus dilakukan lebih awal untuk meningkatkan keamanan fisik dan ditinjau secara berkala jika keputusan dibuat untuk melanjutkan dalam menghadapi risiko.

Keamanan psikologis adalah tantangan yang dihadapi komisi kebenaran karena mereka mendukung orang-orang yang rentan untuk maju ke depan dan berbagi pengalaman yang menyakitkan. Sebagian besar komisi kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang luar biasa ini sendiri. Masyarakat pribumi, terutama di daerah terpencil, mungkin sudah kekurangan akses ke layanan kesehatan. Kemitraan dengan sistem kesehatan lokal, masyarakat sipil dan organisasi masyarakat pribumi sangat penting, sebelum, selama, dan seringkali lama setelah proses pengungkapan kebenaran.

Relevansi budaya dan kepemilikan masyarakat pribumi atas proses

Proses pengungkapan kebenaran dapat memastikan bahwa hukum adat dan

praktek budaya memvalidasi prosedur dan bentuk ekspresinya. Hal ini dapat dirayakan melalui budaya dengan cara audiensi dan kegiatan lainnya ketika prosesnya dilakukan.

Sebuah komisi kebenaran tidak perlu terikat dengan metode teknis dan legal untuk mengumpulkan bukti. Pengungkapan kebenaran juga dapat terjadi melalui praktik masyarakat adat tradisional dan kontemporer dalam berbagi informasi dan bercerita, yang seringkali menggabungkan ekspresi budaya termasuk seni visual dan pertunjukan. Melihat lembaga negara resmi merangkul budaya pribumi dapat mendorong rasa kepemilikan atas kebenaran, dan berfungsi sebagai langkah kuat menuju penyembuhan, mengingat penghancuran budaya pribumi yang meluas oleh kebijakan negara. Pada tingkat praktis, memastikan kapasitas untuk melibatkan masyarakat adat dalam bahasa mereka sangat penting, terutama di komunitas terpencil.

Sementara pengambilan pernyataan individu sering menjadi tulang punggung proses pencarian kebenaran, di banyak komunitas pedesaan, bentuk pengungkapan dan berbagi kebenaran kolektif bisa menjadi penting. Komunitas pribumi pada khususnya sering mengalami pengalaman sebagai masyarakat, dan hak-hak yang dimaksud seringkali mencakup hak-hak yang dimiliki secara kolektif. Pendekatan kolektif juga dapat bekerja dengan baik terutama pada kelompok yang terpinggirkan dengan pengalaman serupa, seperti kelompok LGBTQI dan penyandang disabilitas.

Waktu

Sementara komisi kebenaran akan memiliki waktu terbatas untuk menyelesaikan mandatnya, metodologi harus memungkinkan individu dan komunitas untuk berbagi cerita dengan cara dan waktu mereka sendiri. Pekerjaan persiapan di masyarakat dan dengan mitra masyarakat sipil dapat membantu orang-orang bersiap untuk bersaksi.

Banyak Komisi Kebenaran tidak memiliki cukup waktu dan sumber daya untuk mendokumentasikan kebenaran setiap orang yang ingin tampil. Bagi sebagian orang, mandat operasional yang terbatas bukanlah waktu yang tepat untuk bersaksi. Keengganan tersebut dapat meningkat bagi masyarakat pribumi yang mewaspadaai proses resmi tsb.. Banyak komisi telah merekomendasikan mekanisme yang sedang berlangsung untuk pengambilan pernyataan dan pengungkapan kebenaran serta dokumentasi lainnya untuk terus berlanjut dalam masa hidup mereka.

Dimana kebenaran dicari itu penting

Sementara sebagian besar komisi berkantor pusat di ibu kota, beberapa komisi yang

paling efektif telah membawa program kerja mereka ke masyarakat. Pendekatan ini bahkan bisa menjadi lebih penting dalam melibatkan masyarakat pribumi, terutama mereka yang berada di komunitas terpencil. Namun, ini adalah sumber daya yang intensif, membutuhkan tim yang lebih besar dan lebih banyak waktu.

Untuk memfasilitasi penjangkauan dan keterlibatan, sebuah komisi dapat mengembangkan mitra lokal, terutama organisasi masyarakat pribumi. Selain meningkatkan kapasitas lokal komisi, kemitraan dapat memberikan legitimasi di mata masyarakat. Melibatkan pemimpin masyarakat pribumi setempat, para tua-tua adat, organisasi dan jaringan yang membantu membangun kepemilikan lokal atas proses pengungkapan kebenaran.

Mungkin penting untuk mempertimbangkan bagaimana masyarakat pribumi akan menanggapi lokasi atau bangunan tertentu. Di Australia, Komisi Federal untuk Kematian Aborigin dalam Penahanan menghindari penggunaan gedung pengadilan di kota-kota kabupaten untuk dengar pendapat karena asosiasi mereka yang buruk dengan masyarakat pribumi. Di sisi lain, beberapa komisi telah mereklamasi tempat-tempat pelanggaran hak asasi manusia - di Timor-Leste, Komisi Kebenaran merehabilitasi penjara politik yang paling terkenal sebagai markasnya dan mengadakan dengar pendapat di sana.

Apa yang terjadi dengan kebenaran itu penting

Sebelum proses pengungkapan kebenaran dimulai, masyarakat pribumi harus mengetahui apa yang akan terjadi dengan informasi yang mereka bagikan. Untuk mengizinkan persetujuan tanpa paksaan dan informasi, mereka harus memahami keputusan tentang pelaporan, pengarsipan, privasi dan keadaan tanpa nama, serta akses ke materi ini.

Laporan dan produk terkait

Komisi umumnya menghasilkan laporan akhir yang besar dan kompleks tentang temuan dan rekomendasi mereka. Untuk meningkatkan keterlibatan dan tindak lanjut, beberapa juga telah menghasilkan format yang lebih mudah diakses, seperti versi ringkasan, versi remaja dan anak-anak, **booklet** tentang audiensi tematik, produk video dan audio, buku komik, serta produk seni.

Komunitas pribumi mendapat manfaat dari versi terjemahan, serta radio, video, dan format lain untuk komunitas tanpa literasi atau bahasa tertulis yang tersebar luas. Praktek budaya masyarakat pribumi dapat menginformasikan laporan dan presentasinya kepada masyarakat.

Arsip dan aksesibilitas

Sebagian besar komisi mengembangkan rencana untuk pengarsipan dan kesinambungan kelembagaan. Mereka dapat membentuk kemitraan dengan institusi seperti universitas, misalnya di Kanada pada saat penyelesaian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Mungkin membentuk badan baru, seperti di Timor-Leste. Aksesibilitas publik sangat penting untuk memastikan bahwa pelajaran dan hasil komisi terbuka untuk semua dan dapat membantu mendorong perubahan. Laporan dan materi yang dikumpulkan oleh komisi kebenaran merupakan sumber yang kaya untuk sektor pendidikan, penelitian dan seni. Aksesibilitas publik terhadap arsip dapat memainkan peran penting dalam advokasi untuk menerapkan rekomendasi komisi selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Pada saat yang sama, kebijakan yang terkait dengan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan mengenai penggunaan kesaksian dan informasi sangat penting.

Upaya khusus diperlukan untuk membuat bahan-bahan ini dapat diakses oleh masyarakat adat, terutama mereka yang terlibat dengan komisi atau tinggal jauh dari pusat lembaga.

Peran masyarakat non-pribumi, organisasi dan lembaga

Mendengarkan kebenaran yang tidak nyaman dengan penuh hormat adalah bagian dari pengembangan narasi bersama yang baru tentang pengalaman sejarah dan dampaknya yang berkelanjutan. Dengan memberdayakan suara-suara yang sering ditekan ini dan mengembangkan narasi baru, Komisi Kebenaran dapat membantu menyalakan dan memperluas gerakan sosial yang lebih luas untuk perubahan. Lihat Bagian 8.

Berbagi antargenerasi

Orang-orang yang bersaksi tentang Komisi Kebenaran sering mengungkapkan keinginan untuk berkontribusi pada perubahan. Dengan bersaksi, mereka ingin membantu memastikan generasi mendatang tidak pernah mengalami pelanggaran yang sama. Wadah berbagi antargenerasi ini dapat menjadi aspek penyembuhan yang kuat.

Mempromosikan interaksi dengan generasi muda dapat berkontribusi pada advokasi untuk perubahan, dan menginspirasi harapan bagi mereka yang berbagi kebenaran yang menyakitkan. Melibatkan sekolah dan kelompok pemuda dalam proses pengungkapan kebenaran dapat menghasilkan warisan yang kuat dan mengarah pada tindakan setelah proses itu sendiri berakhir.

♂
M



M
♂

Diana Yembise, Broken (Pecah), 2021, Cat
akrilik di atas kertas, 30 x 42 cm. Indonesia,
Kolektif Uneido & Asia Justice and Rights.

07

Pentingnya Kemitraan dengan Masyarakat Sipil dan Media Massa

Sebagian besar Komisi Kebenaran membutuhkan kemitraan mendasar dengan para korban pelanggaran dan asosiasi serta perwakilan mereka. Hubungan ini, yang sering kali dimulai dengan advokasi oleh kelompok-kelompok semacam itu untuk mendorong proses pengungkapan kebenaran, harus dipelihara sepanjang hidupnya sebuah komisi dan untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasinya. Hubungan dengan kelompok-kelompok ini dapat memperluas jangkauan komisi sambil membangun kapasitas organisasi masyarakat pribumi.

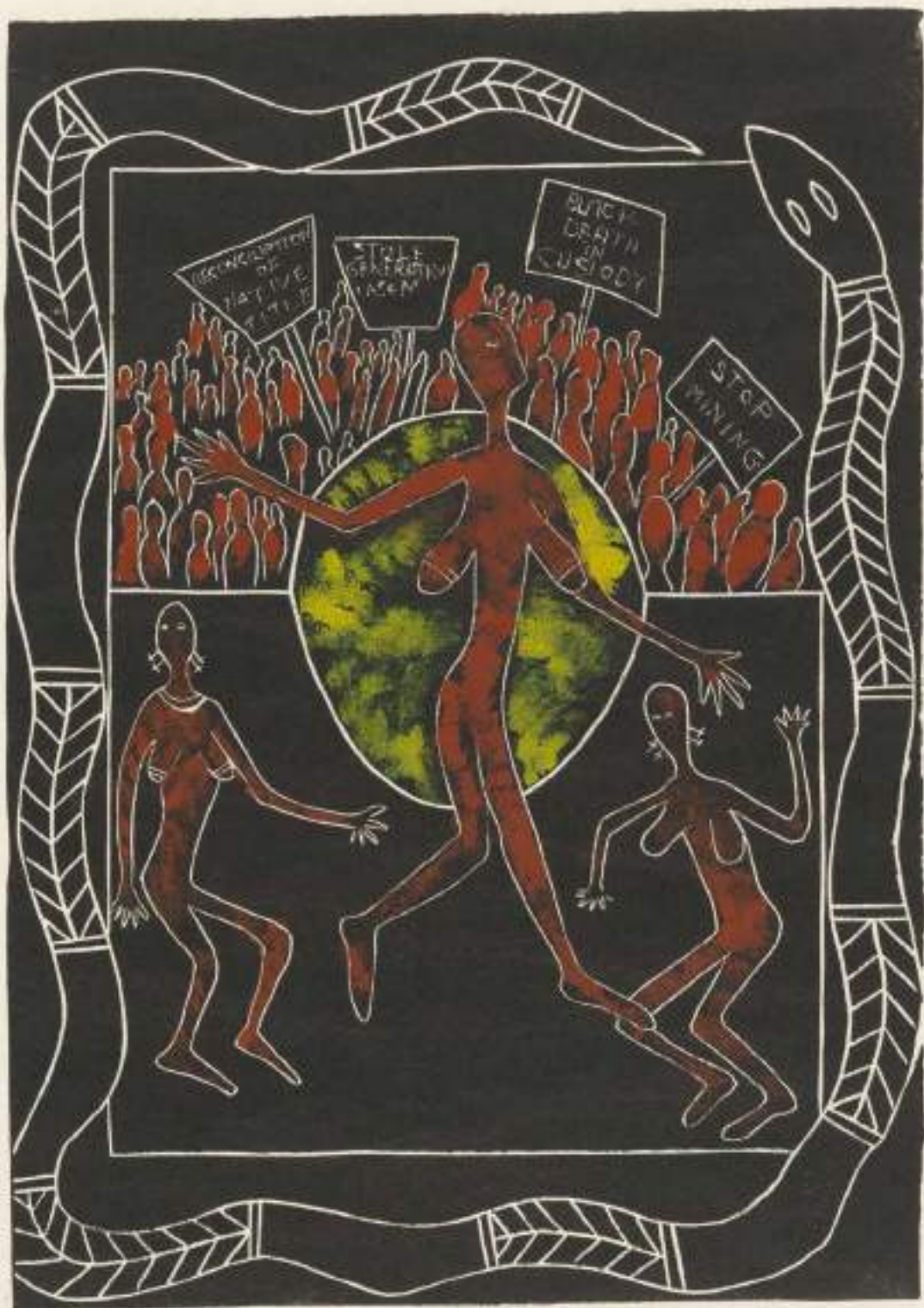
Komisi berhubungan dengan isu-isu sensitif dan dapat menarik dukungan politik dan oposisi selama pekerjaan mereka. Sebagian besar ketegangan ini dapat terjadi di media massa tradisional dan sosial dan perlu dikelola secara proaktif. Komisi Kebenaran harus dapat menjangkau masyarakat pribumi melalui media untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan dalam proses tersebut. Hubungan terfokus dengan media masyarakat pribumi dapat mencakup investasi dalam kapasitas, terutama untuk menjangkau komunitas terpencil atau terpinggirkan.

Peluang untuk kemitraan masyarakat sipil

Ada banyak peluang untuk memperkuat hubungan di berbagai tahapan proses. Masyarakat sipil, khususnya organisasi masyarakat pribumi, dapat berperan:

- Sebagai anggota dewan atau komite penasihat.
- Memantau operasi dan kinerja proses secara eksternal.
- Menyelenggarakan konsultasi dengan masyarakat pribumi.
- Sebagai komisaris.
- Sebagai sumber staf teknis untuk penjangkauan masyarakat, dukungan korban, pengambilan pernyataan, pengorganisasian dengar pendapat, analisis data, dan komunikasi.
- Sebagai pelatih komisaris dan staf.
- Sebagai penasehat budaya.

- Dalam mengorganisir dengar pendapat lokal dan acara-acara terkait kebenaran.
- Sebagai jaringan pendukung bagi mereka yang bersaksi di depan komisi.
- Sebagai kontraktor di bidang tertentu, seperti layanan psiko-sosial atau penelitian.
- Sebagai advokat untuk komisi, berkontribusi baik untuk advokasi politik dan memperluas aspek pendidikan dari proses di dalam konstituen mereka, termasuk sektor bisnis.
- Mengembangkan narasi baru, khususnya di sektor pendidikan.
- Dalam memperluas jangkauan proses pengungkapan kebenaran di seluruh negeri dan mempromosikan diskusi publik, terutama dengan mitra media. Media Pribumi khususnya memiliki hubungan dengan khalayak masyarakat pribumi, serta keterampilan bahasa dan budaya.



Mary Evanson

Mary Cummins, tanpa judul [tiga perempuan pribumi
dengan demonstran yang memegang poster, dengan
motif ular] 1982-2001, linocut, 40.2 h x 28.4 w cm.
Dengan izin Galeri Nasional Australia, Canberra.

08

Komisi Kebenaran sebagai Proses Pendidikan Publik

Komisi mengungkap fakta dan kebenaran yang telah lama dipendam, memberi ruang bagi suara dan cerita mereka yang paling terpinggirkan dan menjadi korban dalam masyarakat. Proses ini secara fundamental mengubah sejarah dan narasi bersama. Komisi Kebenaran dapat melibatkan publik dalam proses ini 1) selama pencarian kebenaran, 2) dalam laporan akhir dan produk terkait, dan 3) dalam kegiatan tindak lanjut.

Selama proses pencarian kebenaran

Sejak proses kebenaran dan rekonsiliasi Afrika Selatan, Komisi Kebenaran telah menggunakan audiensi publik, yang diperkuat oleh media. Media sosial menawarkan lebih banyak kesempatan untuk melibatkan komunitas. Proses publik dengan potensi yang kuat untuk keterlibatan dan pendidikan meliputi:

- Audiensi publik, di tingkat nasional dan lokal, mungkin merupakan alat publik yang paling kuat dari proses pengungkapan kebenaran.
- Peringatan publik, misalnya di lokasi kekejaman.
- Seni dan pertunjukan publik.
- Seminar dan diskusi kelompok (termasuk melalui media sosial), di tingkat lokal dan nasional. Mekanisme ini dapat mentargetkan kelompok tertentu, seperti organisasi perempuan, kelompok LGBTQI, dan komunitas etnis.
- Program oleh organisasi keagamaan yang memberikan dukungan dan penguatan.
- Kurikulum, rencana satuan pelajar dan kegiatan berbasis sekolah lainnya yang difokuskan pada proses pengungkapan kebenaran.
- Studi lebih lanjut tentang aspek-aspek spesifik dari proses ini oleh akademisi.
- Kemitraan dengan media massa, terutama media pribumi, untuk memberikan wawasan publik yang lebih dalam tentang proses dan cerita yang muncul dari komisi.

Laporan akhir

Laporan akhir adalah catatan resmi yang menjadi landasan bagi perubahan kelembagaan

dan kebijakan. Ini juga dapat mengubah narasi nasional publik, mendukung keterlibatan sosial dan pendidikan yang berkelanjutan sebagai dasar untuk penelitian, kurikulum, proyek media, dan interpretasi seni kreatif. Karena laporan bisa panjang dan teknis, Komisi Kebenaran dapat menghasilkan produk yang lebih populer, termasuk produk multimedia dan versi anak-anak.

Setelah Komisi Kebenaran

Mempertahankan keterlibatan publik membutuhkan tanggung jawab kelembagaan untuk tindak lanjut dan sumber daya yang memungkinkan penjangkauan dan advokasi atas temuan dan rekomendasi. Kemitraan yang dikembangkan selama masa komisi akan sangat penting untuk ditindaklanjuti, terutama di media massa, masyarakat sipil, dan organisasi pendidikan serta organisasi keagamaan. Produk dan program yang dikembangkan dalam kemitraan dengan masyarakat pribumi, dalam bahasa lokal, juga dapat menjadi inisiatif penting.

Pelajaran praktis tentang keterlibatan publik

- Buat keputusan kebijakan yang jelas sejak awal tentang tujuan untuk terlibat dengan dan mendidik publik. Bagaimana publik tentang prosesnya? Siapa audiens utama dan bagaimana mereka akan terlibat secara efektif?
- Membentuk tim penjangkauan dan media massa/media sosial yang berdedikasi, sebagai inti dari pekerjaan komisi. Pastikan kapasitas untuk terlibat dengan komunitas pribumi termasuk dalam bahasa yang relevan.
- Memberikan pelatihan media massa dan media sosial kepada komisar dan staf, termasuk kesadaran budaya dalam berkomunikasi dengan masyarakat pribumi.
- Membangun kemitraan media, terutama dengan media pribumi di semua tingkatan, untuk memungkinkan penjangkauan dan keterlibatan yang efektif dengan keragaman penuh komunitas pribumi. Sumber daya media pribumi lokal untuk meliput pekerjaan komisi, terutama dalam bahasa lokal.
- Kembangkan dan pertahankan hubungan dengan masyarakat sipil dan organisasi keagamaan dan berikan mereka pengarahan, materi, dan akses ke komisi. Pastikan bahwa kemitraan ini mencakup organisasi masyarakat pribumi, dan memiliki hubungan dengan kelompok masyarakat pribumi setempat.
- Kembangkan paket sekolah dan universitas untuk memfasilitasi cara bagi siswa untuk terlibat dalam proses komisi dan menjadi pendukung perubahan.
- Menetapkan tanggung jawab institusional untuk tindak lanjut, termasuk mensosialisasikan temuan dan rekomendasi komisi. Memberdayakan masyarakat sipil dan mitra lainnya untuk melanjutkan penjangkauan dan advokasi setelah komisi. Libatkan pemangku kepentingan masyarakat pribumi dalam kepemimpinan dan semua langkah proses ini.



Berpelukan didepan mural untuk mengingat anak-anak pribumi yang hilang pada peringatan Hari Kebenaran dan Rekonsiliasi yang pertama, Gedung Parlemein di Ottawa, Kanada. September, 2021. (Foto oleh Lars Hagberg/AFP lewat Getty Images).



09

Di balik Proses Pengungkapan Kebenaran: Rencana Tindak Lanjut

Sebuah Komisi Kebenaran terjadi untuk jangka waktu terbatas, dalam mandat tertentu. Ini adalah satu langkah dalam proses keadilan dan perubahan sosial yang biasanya dimulai jauh sebelum komisi dibentuk, dan harus berlanjut jauh setelah komisi itu hidup.

Masyarakat pribumi dan lainnya harus memiliki harapan yang realistis dan strategis untuk sebuah Komisi Kebenaran. Menerapkan rekomendasi bahkan dari Komisi Kebenaran yang paling signifikan dan sukses merupakan tantangan besar jangka panjang. Komisi dan proses pengungkapan kebenaran lainnya harus merencanakan upaya ini dan menempatkan blok bangunan untuk advokasi di masa depan.

Pelajaran untuk tindakan yang sedang berlangsung

- Membangun dan mempertahankan kredibilitas akan memperkuat kapasitas komisi untuk menahan serangan balik, dan membuat lebih sulit untuk mengabaikan temuan dan rekomendasinya. Upaya ini harus mencakup hubungan yang kuat dengan beragam komunitas masyarakat pribumi yang terlibat. Komisi harus memperhitungkan waktu dan sumber daya yang diperlukan sepanjang masa berlakunya.
- UNDRIP harus menjadi panduan dalam hubungan komisi dengan masyarakat pribumi. Instrumen ini memberikan prinsip dan perlindungan yang diterima secara internasional untuk semua langkah mandat dan operasional komisi, termasuk konsultasi tentang rekomendasi dan tindak lanjut.
- Partisipasi organisasi dan komunitas masyarakat pribumi selama proses pengungkapan kebenaran dapat membantu membangun kapasitas mereka untuk advokasi yang berkelanjutan, yang diperlukan untuk membantu mencapai implementasi dari rekomendasi.
- Proses yang kuat untuk memantau pelaksanaan rekomendasi tidak boleh diabaikan, dan harus memiliki kepemilikan dan perwakilan masyarakat pribumi yang memadai.

- Masyarakat pribumi harus dilibatkan dalam tata kelola dan kerja lembaga lanjutan yang memungkinkan akses ke arsip, memberikan dukungan kepada korban, melanjutkan pengungkapan kebenaran, dan mendidik generasi mendatang. Materi yang berkaitan dengan masyarakat pribumi harus dipelihara dengan persetujuan mereka dan dengan cara yang sesuai secara budaya.

Referensi berdasarkan Bab

Bab 1: Masyarakat adat di seluruh dunia

International Labour Organization. (2019). Implementing the ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention No. 169: Towards an inclusive sustainable and just future. Dapat diakses melalui: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_735607.pdf

Laman resmi dari International Working Group for Indigenous Affairs. (n.d.). Dapat diakses melalui: <https://www.iwgia.org/en/>

Asia Indigenous People Pact (AIPP). (Mei 2014). Overview of the State of Indigenous Peoples in Asia. Dapat diakses melalui: <http://www.gapeinternational.org/wp-content/uploads/2011/08/asia-ipoverview-final.pdf>

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2019). State of the World Indigenous Peoples 4th Volume: Implementing the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Dapat diakses melalui: <https://social.un.org/unpfi/sowip-vol4-web.pdf>

United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. (n.d.). Factsheet: Indigenous Peoples, Indigenous Voices. Dapat diakses melalui: https://www.un.org/esa/socdev/unpfi/documents/5session_factsheet1.pdf

Bab 2: Penduduk pribumi dan hak asasi manusia

Asia Pacific Forum & United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. (2013). The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People: A Manual for National Human Rights Institutions. Dapat diakses melalui: <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/UNDRIPManualForNHRIs.pdf>

International Labour Organization Convention No. 169 Indigenous and Tribal Peoples, 1989. Dapat diakses melalui: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314

- International Labour Organization. (2019). Implementing the ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention No. 169: Towards an inclusive sustainable and just future. Dapat diakses melalui: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_735607.pdf
- United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. (2018). Indigenous peoples' collective rights to lands, territories and resources. Dapat diakses melalui: <https://www.un.org/development/desa/Indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/04/Indigenous-Peoples-Collective-Rights-to-Lands-TerritoriesResources.pdf>
- Laman resmi dari International Year of Indigenous Languages. (n.d.). Dapat diakses melalui: <https://en.iyl2019.org/>
- Refworld. (n.d.). International Year of Indigenous People 1993. Dapat diakses melalui: <https://www.refworld.org/docid/3bo0fo8ab.html>
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (n.d.). Indigenous Peoples: Second International Decade of the World's Indigenous People. Dapat diakses melalui: <https://www.un.org/development/desa/Indigenouspeoples/secondinternational-decade-of-the-worlds-Indigenous-people.html>
- Laman resmi dari Second World Conference of Indigenous Women. (n.d.). Dapat diakses melalui: <https://worldconferenceiw.org/en/>
- The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (n.d.). Upcoming Decade of Indigenous Languages (2022 – 2032) to focus on Indigenous language users' human rights. Dapat diakses melalui: <https://en.unesco.org/news/upcoming-decade-Indigenous-languages-2022-2032-focus-Indigenous-language-users-human-rights>
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2013). Adolescent-Friendly Version of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Dapat diakses melalui: <https://www.un.org/development/desa/Indigenouspeoples/publications/2013/09/adolescent-friendly-version-of-the-un-declaration-on-the-rights-of-Indigenous-peoples/>
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (n.d.). First International Decade of the World's Indigenous People (1995-2004). Dapat diakses melalui: <https://www.un.org/development/desa/Indigenouspeoples/secondinternational-decade-of-the-worlds-Indigenous-people/7276-2.html>
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (n.d.). International Day of the World's Indigenous Peoples. Dapat diakses melalui: <https://www.un.org/development/desa/Indigenouspeoples/international-day-of-the-worlds-Indigenous-peoples.html>
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2019). International Year of Indigenous Languages. Dapat diakses melalui: <https://www.un.org/development/desa/dspd/2019/01/2019-international-year-of-Indigenous-languages/>

- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2019). State of the World Indigenous Peoples 4th Volume: Implementing the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Dapat diakses melalui: <https://social.un.org/unpfi/sowip-vol4-web.pdf>
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2021). State of the World Indigenous Peoples 5th Volume: Rights to Lands, Territories and Resources, ST/ESA/375. Dapat diakses melalui: <https://www.un.org/development/desa/Indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2021/03/State-of-Worlds-Indigenous-Peoples-Vol-V-Final.pdf>
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (n.d.). The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. Dapat diakses melalui: <https://www.un.org/development/desa/Indigenouspeoples/>
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2007). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Dapat diakses melalui: <https://www.un.org/development/desa/Indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-Indigenous-peoples.html>
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (n.d.). World Conference on Indigenous Peoples. Dapat diakses melalui: <https://www.un.org/development/desa/Indigenouspeoples/about-us/world-conference.html>
- United Nations Economic and Social Council. (8 Mei 2012). “Doctrine of Discovery”, Used for Centuries to Justify Seizure of Indigenous Land, Subjugate Peoples, Must Be Repudiated by United Nations, Permanent Forum Told. UN Press Release and Meeting Notes. Economic and Social Council. Permanent Forum on Indigenous Issues, Eleventh Session, 3rd & 4th Meetings. Dapat diakses melalui: <https://www.un.org/press/en/2012/hr5088.doc.htm>
- United Nations General Assembly. (13 September 2013). Global Indigenous Preparatory Conference for the United Nations high-level plenary meeting of the General Assembly to be known as the World Conference on Indigenous Peoples: Alta Outcome Document, A/67/994. Dapat diakses melalui: <https://undocs.org/en/A/67/994>
- United Nations General Assembly. (25 September 2014). Outcome document of the high-level plenary meeting of the General Assembly known as the World Conference on Indigenous Peoples, A/RES/69/2. Dapat diakses melalui: <https://undocs.org/en/A/RES/69/2>
- United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. (n.d.). Annual reports: Expert Mechanism for the Rights of Indigenous Peoples. Dapat diakses melalui: <https://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/AnnualReports.aspx>
- United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. (n.d.). Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples. Dapat diakses melalui: <https://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/EMRIPIndex.aspx>

- United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. (n.d.). Factsheet: Indigenous Peoples, Indigenous Voices. Dapat diakses melalui: https://www.un.org/esa/socdev/unpfi/documents/5session_factsheet1.pdf
- United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. (Agustus 2013). Fact Sheet No. 9, Rev. 2, Indigenous Peoples and the United Nations Human Rights System: Indigenous peoples' collective rights to lands, territories and resources. Dapat diakses melalui: <https://www.ohchr.org/documents/publications/fs9rev.2.pdf>
- United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. (n.d.). Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples. Dapat diakses melalui: <https://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIIndigenousPeoples/Pages/SRIPeoplesIndex.aspx>
- World Conference of Indigenous Women: Progress And Challenges Regarding The Future We Want. (11 Oktober 2013). Cultural Survival Quarterly Magazine. Dapat diakses melalui: <https://www.culturalsurvival.org/news/world-conference-Indigenous-womenprogress-and-challenges-regarding-future-we-want>

Bab 3: Keadilan transisional, hak atas kebenaran, dan mekanisme pengungkapan kebenaran

- International Center for Transitional Justice. (2013). Truth Seeking: Elements of Creating an Effective Truth Commission. Amnesty Commission of the Ministry of Justice of Brazil & International Center for Transitional Justice. Dapat diakses melalui: <https://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Book-Truth-Seeking-Bab1-2013English.pdf>
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (n.d.). Report of the Commission on Human Rights, 62nd session: Study on the right to the truth. Dapat diakses melalui: [E/CN.4/2006/91, 8 February 2006. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/Go6/106/56/PDF/Go610656.pdf?OpenElement](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/Go6/106/56/PDF/Go610656.pdf?OpenElement)
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (21 Agustus 2009). Right to Truth: Report of the Human Rights Council, 12th session, A/HRC/12/19. Dapat diakses melalui: <https://undocs.org/A/HRC/12/19>
- United Nations. (n.d.). International Day for the Right to the Truth Concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims (24 March). Dapat diakses melalui: <https://www.un.org/en/observances/right-to-truth-day>

Bab 4: Perjuangan lebih luas bagi hak-hak masyarakat pribumi: apa peran dari mengatakan kebenaran?

- Arthur, J., González, E., Lam, Y., Rice, J., Rodríguez-Garavito, C., & Yashar, D. J. (5 April 2012). Strengthening Indigenous Rights through Truth Commissions: A Practitioner's Resource. International Center for Transitional Justice. Dapat diakses melalui: <https://www.ictj.org/publication/strengthening-Indigenous-rights-throughtruth-commissions-practitioners-resource>
- Arthur, P. (2014). Indigenous Self-determination and Political Rights: Practical Recommendations for Truth Commissions. Indigenous Peoples' Access to Justice, Including Truth and Reconciliation Processes. Institute for the Study of Human Rights, Columbia University. Dapat diakses melalui: <https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8V123NN>
- Jung, C. (Oktober 2009). Research Brief: Transitional Justice for Indigenous People in a Non-transitional Society. International Center for Transitional Justice. Dapat diakses melalui: <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Identities-NonTransitionalSocietiesResearchBrief-2009-English.pdf>
- Librizzi, M. F. (2014). Challenges of Truth Commissions to Deal with Injustice Against Indigenous Peoples. Indigenous Peoples' Access to Justice, Including Truth and Reconciliation Processes. Institute for the Study of Human Rights, Columbia University. Dapat diakses melalui: <https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8GT5M1F>
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (n.d.). Indigenous Peoples: Climate Change. Dapat diakses melalui: <https://www.un.org/development/desa/Indigenouspeoples/climate-change.html>

Bab 5: Memahami pengalaman khusus kaum perempuan

- Aoláin, F. N. & Turner, C. (2007). Gender, Truth & Transition. UCLA Women's Law Journal 16(2). Dapat diakses melalui: <https://escholarship.org/uc/item/3f0919dd>
- Marchetti, E. M. (Mei 2005). Missing Subjects: Women and Gender in the Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody [PhD Thesis, Griffith University, Queensland, Australia]. Research Repository. Dapat diakses melalui: https://research-repository.griffith.edu.au/bitstream/handle/10072/366882/Marchetti_2005_01Thesis.pdf?sequence=1
- Nesiah, V. et al. (2006). Gender Justice Series: Truth Commissions and Gender: Principles, Policies, and Procedures. International Center for Transitional Justice. Dapat diakses melalui: https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Commissions-Gender-2006English_0.pdf
- Porter, E. (2016). Gendered Narratives: Stories and Silences in Transitional Justice. Human Rights Review 17, 35-50. Dapat diakses melalui: <https://doi.org/10.1007/s12142-015-0389-8>

- Valji, N. (2007). Gender Justice and Reconciliation. Dialogue on Globalization, Occasional Papers, Berlin, No 35/2007. Dapat diakses melalui: <https://library.fes.de/pdf-files/iez/o5000.pdf>
- World Bank. (Juni 2006). Gender, Justice, and Truth Commissions. PREM Gender and Development Group (PRMGE), Conflict Prevention and Reconstruction Team (SDV), Legal and Judicial Reform Practice Group (LEGJR), & LAC Public Sector Group (LCSPS). Dapat diakses melalui: <https://documents1.worldbank.org/curated/pt/306291468298154907/pdf/376060Genderjustice01PUBLIC1.pdf>

Bab 6: Metode untuk partisipasi yang bermakna dalam suatu proses mengatakan kebenaran

- International Center for Transitional Justice. (3 Maret 2017). Public Hearings: Platforms of Truth, Dignity, and Catharsis. Dapat diakses melalui: <https://www.ictj.org/news/public-hearings-platforms-truth-dignity>
- Laman resmi dari National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls Canada. Dapat diakses melalui: <https://www.mmiwg-ffada.ca/>
- Reconciliation Australia. (7 Februari 2019). 2018 Truth-telling Symposium Report. Dapat diakses melalui: <https://www.reconciliation.org.au/publication/2018-truth-telling-symposiumreport/>
- Rodeemos el Dialogo (Embrace Dialogue). (n.d.). Truth Commission Snapshot 17, Beyond Victims: Acknowledging the Indigenous Truth. Dapat diakses melalui: <https://uk.rodeemoseldialogo.org/2020/11/beyond-victims-acknowledging-theIndigenous-truth/>
- Wandita, G., Yolanda, S., Saragih, S., Mambrasar, Z., Kafiar, M., Gebze, B., Daby, P., & Molony, T. (2019, Maret). I Am Here: Voices of Papuan Women in the Face of Unrelenting Violence. Asia Justice and Rights (AJAR) bekerja sama dengan Women's Advocacy Institute (eL AdPPER), The Justice, Peace, and Integrity of Creation Section of the Evangelical Christian Church of Papua (KPKC GKITP), The Institute for Human Rights Studies and Advocacy Papua (Elsham Papua), dan Foundation for Women's Voices of Wamena (Yayasan Humi Inane Wamena). Dapat diakses melalui: <https://asia-ajar.org/wp-content/uploads/2019/04/I-am-Here-Voices-of-Papuan-Women-2019.pdf>

Bab 7: Pentingnya kemitraan dengan masyarakat sipil dan media massa

- Australian Human Rights Commission. (n.d.). Bringing them Home: Report of the National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children from Their Families April 1997. Dapat diakses melalui: <https://humanrights.gov.au/our-work/bringing-them-home-report-1997>

- Documentation Working Group on Violence and Human Rights Violations Against Papuan Women. (2009-2010). Enough is Enough!: Testimonies of Papuan Women Victims of Violence and Human Rights Violations 1963-2009. Dapat diakses melalui: https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-IDN-Enough-Women_PapuaReport-2010.pdf
- Laman resmi dari National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls. (n.d.). Dapat diakses melalui: <https://www.mmiwg-ffada.ca/>
- Ndungú, C. G. (Mei 2014). Lessons to be Learned: An Analysis of the Final Report of Kenya's Truth, Justice and Reconciliation Commission. International Center for Transitional Justice. Dapat diakses melalui: <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Briefing-Kenya-TJRC-2014.pdf>
- Wabanaki REACH. (n.d.). Maine Wabanaki-State Child Welfare Truth and Reconciliation Commission. Dapat diakses melalui: https://www.mainewabanakireach.org/maine_wabanaki_state_child_welfare_truth_and_reconciliation_commission

Bab 8: Keterlibatan umum dan pendidikan

- Australian Human Rights Commission. (n.d.). Bringing them Home: Report of the National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children from Their Families April 1997. Dapat diakses melalui: <https://humanrights.gov.au/our-work/bringing-them-home-report-1997>
- Centro Nacional Chega!. (n.d.). Children's comic book version of the CAVR. Dapat diakses melalui: <https://chega.tl/downloads/#chegareport>
- Liévano, A. B. (2 April 2021). Patricia Tobón Yagarí: "A Legacy of Colombia's TRC Will Be the Active Participation of Ethnic Peoples". JusticeInfo.net. Dapat diakses melalui: <https://www.justiceinfo.net/en/75613-patricia-tobon-yagarilegacy-colombiastrc-active-participation-ethnic-peoples.html>
- National Human Rights Commission of Indonesia (Komnas HAM). (Maret 2016). National Inquiry on the Right of Indigenous Peoples on Their Territories in the Forest Zones: Summary of Findings and Recommendations. Dapat diakses melalui: <https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2016/04/komnashamnatinquiry-summary-apr2016.pdf>
- National Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM). (April 2013). Report of the National Inquiry into the Land Rights of Indigenous Peoples. Dapat diakses melalui: <https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/07/suhakamenquiry-fulltext2013.pdf>
- Laman resmi dari National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls. (n.d.). Dapat diakses melalui: <https://www.mmiwg-ffada.ca/>
- Laman resmi dari Truth and Reconciliation Commission Peru. (n.d.). Dapat diakses melalui: <https://www.cverdad.org.pe/ingles/pagina01.php>

“Beyond 94: Truth and Reconciliation in Canada”. (19 Maret 2018). Canadian Broadcasting Corporation (CBC) News. Dapat diakses melalui:
<https://newsinteractives.cbc.ca/longform-single/beyond-94?&cta=1>

Bab 9: Di balik proses pengungkapan kebenaran: rencana tindak lanjut

Aboriginal and Torres Strait Islander Healing Foundation. (n.d.). Bringing Them Home 20 years on: an action plan for healing. Dapat diakses melalui:
<https://healingfoundation.org.au/app/uploads/2017/05/Bringing-Them-Home20-years-on-FINAL-SCREEN-1.pdf>

Laman resmi dari Centro Nacional Chega! Timor Leste. (n.d.). Dapat diakses melalui:
<https://chega.tl/>

Dodson, P. (2016, April 13). Patrick Dodson: 25 Years on From the Royal Commission Into Aboriginal Deaths in Custody Recommendations. National Press Club. Dapat diakses melalui: <http://www5.austlii.edu.au/au/journals/IndigLawB/2016/12.pdf>

National Action Plan. (n.d.). 2021 National Action Plan. Dapat diakses melalui:
<https://mmiwg2splus-nationalactionplan.ca/>

National Centre for Truth and Reconciliation Canada. (n.d.). About NCTR. Dapat diakses melalui: <https://nctr.ca/>

Laman resmi dari The Healing Foundation Australia. (n.d.). Dapat diakses melalui:
<https://healingfoundation.org.au/>

